

ANALISIS PASAR KREDIT SEKTOR PERTANIAN

(Indonesia 2006 - 2012)

Oleh:

AHMAD SAMHAN S. MUBARAK

G 311 08 286



JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2014

ANALISIS PASAR KREDIT SEKTOR PERTANIAN
(*INDONESIA 2006 - 2012*)

Oleh :

AHMAD SAMHAN S. MUBARAK
G 311 08 286

Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pertanian

Pada

Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian
Universitas Hasanuddin
Makassar
2014

Disetujui oleh,

Prof.Dr.Ir. Rahim Darma, MS
Dosen Pembimbing

Dr. Muhammad Arsyad, S.P., M.Si
Dosen Pembimbing

Mengetahui :

Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis,MS.
NIP 19610829 198601 2 001

Tanggal Pengesahan : Februari 2014

**PANITIA UJIAN SARJANA
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Judul : ANALISIS PASAR KREDIT SEKTOR PERTANIAN
(Indonesia 2006 - 2012)

Nama : AHMAD SAMHAN S. MUBARAK

Nim : G 311 08 286

TIM PENGUJI

Prof. Dr. Ir. Rahim Darma, MS
Ketua Sidang

Dr. Muhammad Arsyad, SP., M.Si
Anggota

Ir. Idris Summase, M.Si
Anggota

Dr. Ir. Mahyuddin, M.Si
Anggota

Dr. A. Nixia Tenriawaru, SP., M.Si
Anggota

Tanggal Ujian : Februari 2014

RINGKASAN

Ahmad Samhan S. Mubarak, G 311 08 286. Analisis Pasar Kredit Sektor Pertanian (Indonesia 2006 - 2012), di bawah bimbingan **Rahim Darma** dan **Muhammad Arsyad**.

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1). Untuk menganalisis, mengidentifikasi dan mengukur pengaruh Rasio Produk Domestik Bruto (PDB), Kurs, Inflasi, Suku Bunga Kredit, modal dan Non Performing Loan terhadap jumlah Kredit pada Sektor Pertanian di Indonesia. 2). Untuk mengetahui pengaruh dari faktor permintaan maupun faktor penawaran terhadap fenomena ketidakseimbangan jumlah kredit pada sektor pertanian.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia dan Biro Pusat Statistik (BPS), dimana hampir seluruh data keuangan diperoleh dari Bank Indonesia. Pemilihan periode 2006 – 2012 di ambil dengan pertimbangan bahwa periode ini, perekonomian Indonesia telah masuk pada tahap perkembangan dan pemulihan pasca krisis dan cenderung membaik dari tahun ke tahun. Namun begitu, membaiknya perekonomian ini justru menyebabkan sektor pertanian kurang diperhatikan. Oleh karena itu cukup menarik untuk mengkaji lebih dalam perkembangan sektor pertanian dalam hal ini masalah perkreditan pada periode yang telah disebutkan di atas..

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data kuartal mulai dari kuartal I (Maret) Tahun 2006 sampai dengan kuartal IV (Desember) Tahun 2012 dengan lokasi penelitian adalah wilayah Indonesia secara keseluruhan. Data yang diperoleh dari Bank Indonesia antara lain, posisi kredit Bank Umum sektor pertanian, nilai tengah kurs Rupiah terhadap US Dollar, suku bunga kredit modal kerja dan suku bunga kredit investasi Bank Umum dan tingkat inflasi. Adapun data yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik adalah data PDB sektor pertanian.

Dari keseluruhan analisis mengenai pengaruh faktor penentu jumlah kredit sektor pertanian di Indonesia, hasil yang diperoleh adalah: 1). Rasio PDB, inflasi dan NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah kredit sektor pertanian. 2). Suku bunga dan modal perbankan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah kredit pada sektor pertanian. 3). Kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kredit sektor pertanian. Hasil diatas menunjukkan perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasinya selalu terfokus pada sektor yang di anggap beresiko rendah serta menganggap sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang dianggap beresiko tinggi dan memiliki tingkat asymmetric information yang tinggi pula karna berkaitan dengan faktor alam.

Kata Kunci: Analisis, Pasar kredit, Sektor Pertanian

ABSTRACT

Ahmad Samhan S. Mubarak, G 311 08 286. The Analysis Of Credit Market of Agriculture Sector (Indonesia 2006 - 2012) Supevised by **Rahim Darma** and **Muhammad Arsyad**.

This research are aiming at : 1). Analysing, Identification, and measuring to what extent the influence of the ratio of Domestic Product of Bruto, rate, inflation, credit rate of interest, capital, and NPL toward the total of credit on agriculture sector in indonesia. 2). Investigation the influence of demand factor and offer factor toward the imbalance of the total number of credit on agriculture sector.

Data used in this research is the secondary data that has taken from bank of Indonesia and federal bureau of statistic. The period 2006 – 2012 was chosen because in this period Indonesia Economy enter to the developing fase and recovered pasca crisis. In fact, Indonesian economy get better but it makes the agriculture sector careless. So, it is intersting to study deeper about the development of agriculture sector that in this case the credit problem at the period that have been written above.

The analysis of the data in this research has been done by using quartal data, begin from quartal I (march) 2006 till quartal IV (december) 2012. Data that have been taken from Bank of Indonesia are credit position general Bank Agriculture sector, middle value of rupiah rate toward US Dollar, working capital credit rate of interest and general bank investment credit rate of interest and inflation rate. In addition, the data that had been received from Federal Bureau of Statistic is Domestic Product of Bruto data in Agriculture Sector.

Based on the perfect analysis about the influence of the determinant of credit total of Agriculture Sector in Indonesia, it can be concluded that 1). Domestic Product of Bruto ratio, inflation, and NPL does not have influence toward the total of credit on agriculture sector 2). Interest and Capital influence toward the total credit on agriculture sector. 3). Rate has positive influence toward the total credit on agriculture sector. The result of this research that the banking always focuses on sector that have allowed risk and that agriculture sectors is one of the sector that has a high risk and have a high level of asymmetric information, and it was connected with nature's factor.

Key words : analysis, Credit Market, Agriculture Sector.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Ahmad Samhan S. Mubarak, lahir di Majene pada tanggal 12 November 1990. Merupakan anak Kedua dari lima bersaudara dari pasangan Drs. H. Sufyan Mubarak, SH., MH. dan Hj. Arfiah Nur.

Pendidikan formal yang telah dilalui penulis adalah Taman Kanak-Kanak Tamalanrea tahun 1996 dan Sekolah Dasar Negeri 1 Saleppa, Majene tahun 1996 – 2002. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Majene dan tamat pada tahun 2005. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Majene dan tamat pada tahun 2008. Pada tahun yang sama, melalui jalur SNMPTN penulis berhasil diterima sebagai Mahasiswa Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin.

Sebagai seorang mahasiswa, penulis aktif berorganisasi yaitu sebagai Badan Pengurus Harian Mahasiswa Peminat Sosial Ekonomi Pertanian (MISEKTA) periode 2010/2011 dan juga sebagai Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian serta Pengurus Harian Lembaga Dakwah Fakultas (LDF) Ulul Al-Baab Fakultas Pertanian periode 2009/2010. Anggota HMI Angkatan 111 Komisariat Fak. Ekonomi Unhas Tahun 2008, Anggota KOPMA Unhas Angkatan 34 tahun 2011, Penulis juga aktif dalam kepanitiaan yang diadakan oleh MISEKTA, pihak Jurusan, dan pihak Fakultas.

Selain organisasi – organisasi internal universitas, penulis juga pernah menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Organisasi (BPO) Ikatan Mahasiswa Mandar Majene Indonesia (IM3I) Periode 2011 - 2012,dan masih aktif sampai saat ini sebagai anggota penuh (IM3I). Selain itu penulis juga aktif mengikuti seminar-seminar baik di tingkat lokal maupun nasional.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil Alamin. Rasa syukur yang sedalam-dalamnya dihaturkan penulis atas kuasa Sang Pemilik Arsy' yang telah menitipkan ilham dan memberi limpahan kasih sayang yang tak dapat terlukiskan dengan kata-kata sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul "**Analisis Pasar Kredit Sektor Pertanian (Indonesia 2006 - 2012)**".

Dengan segala kemampuan dimiliki, penulis mencoba menyajikan karya penulisan, tetapi disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari kesempurnaan. Penulis telah memberikan segala kemampuan dalam skripsi ini dan diharapkan bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan, khususnya Pertanian. Akhirnya penulis berharap apa yang penulis sajikan ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada pihak yang membacanya, terutama bagi penulis sendiri. Semoga apa yang tersaji dalam laporan ini dapat kita petik manfaatnya dan Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua. Amin .

Makassar, Februari 2014

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH



Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan penghargaan dan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya teristimewa, teriring doa dan kasih sayang yang tiada henti atas segala cinta dan sayang yang tiada berujung, Ayahanda **Drs. H. Sufyan Mubarak, SH., MH.** dan Ibunda **Hj. Arfiah Nur** dengan keikhlasannya telah mengasuh sejak lahir, doa-doanya serta kesempatan yang diberikan memperoleh pendidikan yang terbaik, demikian pula Kakakku tersayang **Munawwarah S. Mubarak, SE., M.Si** adik-adikku **Khadijahtul Fatiyah S. Mubarak, Abdullah Muqsit S. Mubarak dan Muhammad Hilal S. Mubarak** karena berkat doa restu, kasih sayangnya, penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.

Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Olehnya itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Prof. Dr. Ir. Rahim Darma, MS.** selaku Pembimbing I dan **Dr. Muhammad Arsyad, SP., M.Si.** selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi, bimbingan, petunjuk dan arahan-arahan dalam penyempurnaan skripsi ini.

2. **Ir. Idris Summase, M.Si.** dan **Dr. Ir. Mahyuddin, M.Si.** selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran guna penyempurnaan penyusunan tugas akhir ini.
3. **Dr. A. Nixia Tenriawaru, SP., M.Si.,** selaku panitia ujian sarjana dan **Dr. Ir. Rahmadanih, M.Si. serta Dr. Muh. Hatta Jamil, SP., M.Si,** selaku panitia seminar yang memberikan pengetahuan dalam penyusunan tugas akhir.
4. **Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis, MS.** selaku Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian yang telah banyak memberikan pengetahuan dan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan.
5. **Prof. Dr. Ir. Rahmawaty Andi Nadja, MS.** selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan selama penulis menempuh pendidikan.
6. **Bapak dan Ibu Dosen, khususnya Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian,** yang membimbing penulis sejak pertama kali menginjakkan kaki di Universitas Hasanuddin sampai penulis merampungkan tugas akhir ini.
7. Seluruh Staf dan Pegawai Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin. Khususnya **Pak Yusuf, Pak Bahar, dan Kak Hera,** yang telah membantu penulis dalam proses administrasi dalam menyelesaikan skripsi.
8. Sahabat dan Saudaraku di angkatan 2008 Sosek Pertanian Unhas **“ICON KAMI SIKOPANG 08”.** Terima kasih telah membantu dalam

pembuatan skripsi ini, serta atas segala bantuan, saran, motivasi yang tak bosan-bosan diberikan pada penulis serta nasihat-nasihatnya kepada penulis mulai dari pertama menginjakkan kaki di kampus bersama-sama hingga sampai pada saat ini. Suka dan duka yang tercipta selama ini yang menjadi pengalaman berharga bagi penulis karena kalian adalah sahabat dan saudara sekaligus guru yang terbaik yang diberikanNya. Maaf atas segala kekhilafan yang pernah ada. Semoga kita akan terus dalam naungan dan limpahan rahmat dari Allah SWT dimasa sekarang dan akan datang.

9. **Prof. Dr. H. Muh. Yunus Zain, MA dan Prof. Dr. Hj. Rahmatia, MA, Serta Kakak Ipar Amanus Khalifah Fil'ardy, SE.,M.Si** yang selalu memberikan motivasi dan arahan untuk penulis.
10. **Sahabat-sahabat serta orang tersayang** Fahkreza "reza" Al Hasni, Fandy, Harnita "cilo", Enceng "neng" Humaerah, Yusriana "ushy", Alfira Desy "echy" Indriaty, Ira "nyonya" Magfirah, Eling "bungo" Sariasi, dan Tiara "jujuw" Juraid, serta Sitti Aisyah.
11. **Keluarga Besar Mahasiswa Peminat Sosial Ekonomi Pertanian (MISEKTA)**, yang sangat berperan dalam pembentukan kepribadian dan karakter Penulis.
12. **Teman-teman KKN Gel. 80 2011 Kecamatan Ujung Loe, khususnya Desa Salemba Kabupaten Bulukumba.** Serta Keluarga besar Kepala Desa serta warga yang telah menerima dan membantu kami selama KKN.

13. Teman-teman serta para senior di Ikatan Mahasiswa Mandar Majene Indonesia (IM3I) dan Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Mandar Majene (IPPMIMM) tak terkecuali yang senantiasa memberikan motivasi dan pembelajaran hidup bagi penulis.

Demikianlah semoga segala pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis diberikan kebahagiaan dan rahmat oleh Allah SWT, Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Februari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iv
RIWAYAT HIDUP PENULIS	vi
KATA PENGANTAR	viii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah Pokok Penelitian.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian.	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Beberapa Kajian/Landasan Teoritis	12
2.1.1 Isu Penting Fungsi Intermediasi Perbankan di Sektor Pertanian .	14
2.1.2 Pasar Kredit Pertanian.....	16
2.1.3 Beberapa Isu Terkait Instrumen Kebijakan Moneter.....	21
2.2 Kerangka Konseptual Penelitian	28
2.3 Hipotesis Penelitian	33

III. METODE PENELITIAN

3.1. Teknik Pengumpulan Data : Jenis dan Sumber Data.....	34
3.2. Metode Analisis Data.....	35
3.3. Defenisi Operasional.....	37

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Kredit Sektor Pertanian	39
4.2 Pengaruh Kebijakan Bank Indonesia terhadap Pengembangan Sektor Pertanian	46
4.3 Gambaran Umum Perekonomian dan Sektor Pertanian di Indonesia ...	54
4.3.1 Perkembangan PDB Sektor Pertanian Indonesia (2006-2012).....	55
4.3.2 Perkembangan Posisi Kredit pada Sektor Pertanian di Indonesia. ...	58
4.3.3 Perkembangan Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Loan (NPL) Bank Umum di Indoensia.	62
4.3.4 Perkembangan Nilai Kurs, Suku Bunga, dan Inflasi di Indonesia. ...	67
4.4 Analisis Faktor Penentu Jumlah Kredit Sektor Pertanian di Indonesia.	73

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.	83
5.2 Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No.	Teks	Halaman
1.	Indikator Perbankan Nasional (dalam triliunan Rupiah) Periode 2006 – 2010	6
2.	Perkembangan Rasio PDB Sektor Pertanian Terhadap Total PDB Indoensia, Menurut Kuartal Periode 2006 - 2012	56
3.	Perkembangan Posisi Kredit Bank Umum Sektor Pertanian Di Indonesia Periode 2006 - 2012	59
4.	Perkembangan Kinerja Utama Perbankan Nasional di Indonesia Periode 2006 - 2012	64
5.	Perkembangan Kurs, Suku Bunga Kredit Bank Umum dan Inflasi Di Indonesia Periode 2006 - 2012	69
6.	Hasil Estimasi Fungsi Jumlah Kredit Sektor Pertanian.	74

DAFTAR GAMBAR

No.	Gambar	Halaman
1.	Kerangka Konseptual Penelitian	30

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Teks
1	Hasil Regresi Fungsi Jumlah Kredit Sektor Pertanian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang Masalah

Apakah fenomena terjadinya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran lebih disebabkan karena lemahnya permintaan yang disebabkan peminjam yang kurang mengajukan permintaan kreditnya ataukah si pemberi pinjaman yang enggan menyalurkan pinjamannya ? Pasar kredit merupakan pasar yang sangat dinamis, dimana didalamnya terdapat dua kekuatan yang saling berinteraksi yaitu penawaran dan permintaan akan kredit. Interaksi kedua kekuatan tersebut tentunya memerlukan proses waktu yang tidaklah cepat, ini sangat terkait dengan keberadaan informasi diantara kedua belah pihak. Ketika informasi yang tersedia bagi para pelaku pasar adalah sempurna maka proses penyesuaian akan berjalan cepat menuju keseimbangan, akan tetapi jika informasi yang terjadi tidak sempurna (asimetris) maka proses penyesuaian akan sangat lamban.

Permintaan akan kredit diwakili oleh para peminjam (*borrowers*), sedangkan penawaran akan kredit diwakili oleh pemberi pinjaman (*lenders*). Pada saat komponen-komponen pada sisi permintaan dan penawaran akan kredit dijelaskan lebih rinci, maka terdapat beberapa faktor yang

mempengaruhinya. Sisi permintaan dan penawaran akan kredit dipengaruhi oleh tingkat bunga, nilai tukar, dan lain sebagainya.

Stiglitz dan Greenwald, (2003) mengatakan bahwa penyaluran kredit keterkaitan dengan faktor alam yang mengakibatkan tingginya faktor resiko selalu mengalami distorsi. Salah satu penyebab distorsi adalah *asymetric information*. Akibatnya, perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasinya selalu terfokus pada sektor yang dianggap berisiko rendah.

Sisi permintaan dalam hal ini dapat berupa keputusan para pelaku usaha sektor pertanian untuk meningkatkan ataupun menurunkan kinerjanya pada kondisi kurs yang tidak stabil, misalnya . Adapun dari sisi penawaran sektor pertanian yang identik dengan faktor alam yang tidak menentu dapat mempengaruhi keputusan pihak perbankan dalam menyalurkan kredit di sektor pertanian (Anonim, 2005).

Tingginya permintaan kredit mendorong sejumlah kalangan tidak setuju untuk mengatakan permintaan atau kebutuhan kredit sektor pertanian lemah / rendah. Pandangan kelompok yang mengindikasikan lemahnya sisi permintaan sebagai sumber penyebab lambatnya intermediasi perbankan pada dasarnya terkait dengan keyakinan pandangan monetaris tradisional. Pandangan apapun yang diyakini yang pasti bahwa kredit akan menurun sejalan dengan lambatnya aktivitas perekonomian atau rendahnya pertumbuhan ekonomi serta masih tingginya tingkat suku bunga kredit. Terkait dengan hal ini, penelitian yang dilakukan oleh Agung (2001),

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi perkembangan kredit di Indonesia. Dalam ruang lingkup analisa yang sama, Blalock (2003) mengemukakan berbagai alasan, sehingga menyimpulkan bahwa lambannya penyaluran kredit terkait dengan lemahnya sisi permintaan.

Analisa tentang lemahnya permintaan diatas pada dasarnya beranggapan bahwa aktifitas ekonomi merupakan variabel yang berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan timbal balik dengan peningkatan kredit. Di sisi lainnya, analisa tentang penyebab lambatnya pertumbuhan kredit juga dapat dikaitkan dengan variabel lain yaitu pergerakan suku bunga sebagai faktor yang mempengaruhi permintaan kredit. Argumen lain beranjak dari teori mekanisme tranmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga dimana arah suku bunga kredit diyakini merupakan tranmisi akhir dari kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral melalui sinyal suku bunga instrumen moneternya (Walsh, 1998). Berdasarkan teori tersebut, suku bunga kredit akan bergerak menurun bilamana bank sentral menurunkan suku bunganya.

Apakah menurunnya kontribusi sektor pertanian dalam PDB sebagai indikator pembangunan ekonomi (industrialisasi) juga akan berarti penyaluran kredit sektor pertanian harus menurun.

Agenor (2000) menegaskan bahwa belum berfungsinya intermediasi perbankan lebih disebabkan dari sisi penawaran. Pandangan tentang kuatnya kontribusi sistem perbankan dalam mempengaruhi perlambatan kredit dewasa ini secara umum masih selaras dengan pandangan mengenai pentingnya mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur perkreditan. Dalam pandangan ini disebutkan bahwa ketidaksempurnaan informasi yang dimiliki bank terhadap kondisi pasar kredit memiliki arti penting dalam menentukan jenis nasabah dan jumlah kredit yang akan diberikan (Stiglitz dan Greenwald, 2003).

Fakta menunjukkan naik turunnya suku bunga dengan tren yang semakin cenderung meningkat tentu akan semakin memperparah kondisi pelaku usaha sektor pertanian. Karenanya dapat dipahami selalu terjadi disintermediasi penyaluran kredit sektor pertanian. Secara teoritis, perbankan selalu diyakini mampu menyalurkan kredit kepada semua sektor ekonomi yang tidak mengalami distorsi. Namun sekali lagi sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang dianggap beresiko tinggi dan memiliki tingkat *asymmetric information* yang tinggi pula.

Disintermediasi ini diduga pula menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya peran perbankan dalam mendukung perkembangan sektor riil di Indonesia yang merupakan negara agraris (Harmanta dan Ekananda, 2003). Hal ini menuntut perlunya suatu upaya peningkatan fungsi intermediasi perbankan terutama pada sektor pertanian melalui suatu pengamatan

berbagai variabel yang dapat menentukan kemampuan perbankan dalam mendukung pembiayaan sektor pertanian.

Sekali lagi, lebih terfokus arah perbaikan fungsi intermediasi perbankan yang tampak mengarah pada sektor lain di luar sektor pertanian yang memiliki resiko rendah, ternyata merupakan juga salah satu penyebab kinerja perbankan di Indonesia belum optimal (Purwanto, 2005). Satu dasa warsa telah berlalu, sejak krisis mendera Indonesia tahun 1997, sistem perbankan Indonesia benar sudah relatif menjadi kuat namun belum dapat dikatakan memiliki pengembangan pada sektor pertanian.

Perbankan Nasional pada saat krisis, merupakan salah satu komponen sistem ekonomi di Indonesia yang memiliki struktur yang lemah / buruk. Namun pada beberapa tahun belakangan sampai sekarang ini, indikasi penguatan struktur dan sistem perbankan tampak menunjukkan perbaikan.

Dana masyarakat yang berhasil dihimpun perbankan terlihat terus meningkat seiring dengan berangsur pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional (Tabel 1.1). Dari tahun ke tahun dana masyarakat (giro, tabungan, dan deposito) berfluktuasi hingga pada tahun 2010 tumbuh 21,1% sehingga mencapai Rp.2,485.56 Triliun.

Sementara itu, penyaluran kredit/pembiayaan yang diberikan perbankan dewasa ini terlihat belum optimal dan juga belum berjalan selaras dengan peningkatan penghimpunan dana masyarakat tersebut.

Pertumbuhan kredit mengalami perlambatan, pada akhir tahun 2010 kredit tumbuh sebesar 13,5% melambat dibanding tahun-tahun sebelumnya yang sempat tumbuh sebesar 24,4%.

**Tabel 1.1 Indikator Perbankan Nasional (dalam triliunan Rupiah)
Periode 2006-2010**

Tahun	Perhimpunan Dana		Penyaluran Dana		Asset		Permodalan	
	Nilai	Per (%)	Nilai	Per (%)	Nilai	Per (%)	Nilai	Per(%)
2006	1,434.20	-	1,273.70	-	1,693.9	-	183.49	-
2007	1,680.20	17,2	1,480.10	16,2	1,986.5	17,3	211.18	15,1
2008	1,864.18	10,9	1,681.55	13,6	2,310.6	16,3	238.27	12,8
2009	2,053.21	10,1	2,091.30	24,4	2,534.1	9,7	268.60	12,7
2010	2,485.56	21,1	2,373.20	13,5	2,683.1	5,9	288.63	7,5

Sumber Data : Bank Indonesia berbagai Edisi setelah diolah, 2014

Berdasarkan Tabel 1.1 Penyaluran dana terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, yang pada akhir tahun 2010 tumbuh sebesar 13,5%. Terdapat beberapa hal yang dapat dicermati dari data penyaluran dana tersebut, yaitu : (a) pertumbuhan alokasi dana perbankan yang makin meningkat menunjukkan kecenderungan pihak perbankan untuk memilih alokasi dana yang rendah hanya rata-rata sebesar 10% dari DPK, namun menunjukkan adanya *excess liquidity* yang dapat dialokasikan kredit/pembiayaan.

Meskipun terdapat beberapa pandangan yang berbeda alasan tentang belum optimalnya fungsi intermediasi perbankan, perubahan

preferensi bank dalam menyalurkan dananya ini cukup mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat. Perbankan dinilai kurang berpihak terhadap pelaku usaha sektor pertanian dan dengan sendirinya dianggap kurang mendukung upaya percepatan pemulihan perekonomian nasional. Dalam konteks perekonomian secara makro kondisi ini berdampak pada minimnya dukungan pembiayaan yang bersumber dari kredit/pembiayaan perbankan bagi pelaku usaha sektor pertanian.

Lebih lanjut, terhambatnya fungsi intermediasi perbankan di sektor pertanian akan mengganggu upaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan upaya mengurangi permasalahan pengangguran dan pengentasan kemiskinan yang terus meningkat dewasa ini. Data BPS (2010) menunjukkan bahwa jumlah pengangguran terbuka pada akhir tahun 2010 terdapat 10,1 juta jiwa, meningkat tajam dibandingkan jumlah pengangguran pada masa sebelum krisis. Jumlah tersebut diperkirakan jauh lebih besar bilamana turut diperhitungkan pengangguran terselubung.

Secara umum dikatakan bahwa permintaan yang lemah ini terkait dengan belum optimalnya kembali kinerja perekonomian sebagaimana tergambar belum kembalinya pola pertumbuhan ekonomi sebelum krisis. Namun upaya memaksakan pertumbuhan kredit perbankan yang lebih tinggi lagi tanpa memperhatikan kondisi sektor pertanian yang masih lemah justru dapat membahayakan sistem perbankan nasional. Pendapat senada juga

dikemukakan oleh Sugiarto (2003) yang berargumen bahwa pemberian kredit yang dilakukan perbankan sudah cukup tinggi jika dilihat besarnya pemberian kredit baru dibandingkan dengan jumlah kenaikan dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan.

Dalam kondisi tingginya ketidakpastian pasar, menurut Stiglitz dan Weiss (1981) keseimbangan volume kredit akan cenderung mengalami permintaan yang berlebih (*excess demand*) karena pada sisi lain bank telah melakukan penjatahan terhadap kredit yang diberikan (*credit rationing*). Stiglitz dan Greenwald (2003) mengidentifikasi bahwa permasalahan penurunan jumlah kredit dalam perilaku tersebut lebih dominan dipengaruhi oleh perilaku sisi penawaran daripada sisi permintaan. Beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai penyebab lemahnya ekspansi kredit ini, antara lain yaitu (i) ketidaksempurnaan informasi tentang kondisi debitur (*asymmetric information*), dan (ii) persepsi bank terhadap risiko pengembalian kredit yang masih tinggi, sehingga bank melakukan penjatahan kredit (*credit rationing*).

Sementara sangat dipahami bahwa kemampuan bank dalam memberikan kredit/pembiayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akselerasi sektor pertanian. Smith (2003) menyimpulkan bahwa kemampuan pembiayaan perbankan akan mempengaruhi akselerasi sektor riil termasuk sektor pertanian. Ini berlandaskan pada asumsi bahwa kebutuhan pendanaan dalam mendukung ekspansi usaha dari sektor pertanian hanya dapat disediakan oleh sektor perbankan.

Dengan asumsi bahwa pembiayaan kepada sektor pertanian di Indonesia lebih didominasi oleh sektor perbankan, maka akselerasi sektor pertanian di Indonesia diharapkan dapat terealisasi dengan meningkatnya kemampuan perbankan dalam pemberian kredit/pembiayaan sektor-sektor ekonomi produktif. Analog dengan kondisi yang terjadi pada peran kemampuan perbankan memberikan kredit/pembiayaan, maka meningkatnya kegiatan pembiayaan perbankan terhadap sektor pertanian akan berpengaruh terhadap kinerja sektor ini di Indonesia. Implikasi yang diharapkan adalah semakin tinggi kinerja pembiayaan perbankan kepada sektor pertanian, maka akan semakin tinggi kinerja sektor tersebut yang pada akhirnya meningkatkan kinerja sektor pertanian dalam bentuk kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia.

Di sisi permintaan, dalam kondisi resesi ekonomi, penurunan kredit perbankan juga dapat terjadi karena melemah dan rendahnya prospek investasi (*investment opportunities*), tingginya spread suku bunga, kurs, dan inflasi serta belum pulihnya kondisi keuangan pelaku pertanian yang tercermin antara lain dari masih tingginya ratio hutang terhadap modal yang dimiliki (Agenor, dkk, 2000).

Dari uraian tentang masalah penyaluran kredit pada sektor pertanian tampaknya sangat menarik untuk melakukan kajian tentang dari sisi permintaan atau penawaran yang dominan membuat terjadinya fenomena naik turunnya jumlah kredit sektor pertanian. Lebih jauh kajian

tentang pasar kredit dengan menggabungkan aspek dari permintaan kredit maupun penawaran kredit pada sektor pertanian masih saat langka.

Penelitian ini sangat diharapkan pula dapat menjawab masalah-masalah yang melatarbelakangi naik turunnya jumlah kredit di sektor pertanian? Untuk itulah fokus kajian ini adalah tentang pengamatan faktor pasar yang mempengaruhi berfluktuasinya jumlah kredit sektor pertanian dengan judul **Analisis Pasar Kredit Pada Sektor Pertanian (Indonesia 2006 - 2012)**.

1.2 Rumusan Masalah Pokok Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah pokok pada penelitian ini adalah :

- ⇒ Apakah terdapat pengaruh signifikan dari faktor-faktor Rasio PDB, Kurs, Inflasi, Suku Bunga Kredit, Modal dan NPL terhadap jumlah Kredit pada Sektor Pertanian di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- ⇒ Untuk menganalisis, mengidentifikasi dan mengukur seberapa besar pengaruh Rasio Produk Domestik Bruto (PDB), Kurs, Inflasi, Suku Bunga Kredit, modal dan Non Performing Loan terhadap jumlah Kredit pada Sektor Pertanian di Indonesia.
- ⇒ Untuk mengetahui pengaruh dari faktor permintaan maupun faktor penawaran terhadap fenomena ketidakseimbangan jumlah kredit pada sektor pertanian.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil kajian ini akan memberikan kontribusi terhadap pengamatan, pengelolaan dan pendanaan sektor pertanian di Indonesia terutama dalam kaitannya dengan pola pengembangan sistem perbankan atau pola intermediasi sistem perbankan dan kebijakan moneter. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para penentu kebijakan pada sektor ekonomi pertanian di Indonesia, terutama pihak Bank Indonesia, departemen teknis terkait dan legislatif dalam mengidentifikasi efek kebijakan moneter dan kualitas pertumbuhan ekonomi dalam upaya pengembangan sektor pertanian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Beberapa Kajian/Landasan Teoritis

Pembiayaan di sektor agribisnis merupakan salah satu kebutuhan penting bagi mayoritas pelaku usaha di sektor pertanian di sejumlah negara, terutama di negara berkembang berbasis agribisnis seperti, di Indonesia. Kelangkaan kredit pertanian dapat berpengaruh terhadap produktivitas dan pendapatan khusus pelaku agribisnis. Pelaku agribisnis seringkali menghadapi keterbatasan untuk mengakses lembaga perkreditan karena persyaratan agunan (*collateral*) atau karena tingkat pendidikan mereka yang rendah, sehingga kurang paham cara memperoleh kredit. Kondisi ini menyebabkan petani tidak mampu menyediakan secara cukup input produksi seperti pupuk, obat – obatan atau alat dan mesin pertanian (alsintan). Konsekuensinya, petani menjadi pihak yang kurang mendapat keuntungan dari perkembangan teknologi maupun inovasi di bidang pertanian yang umumnya memerlukan tambahan input produksi (Anonim, 1984).

Bagi pelaku agribisnis (petani, peternak dan penambak) kredit bahkan dipandang tidak hanya sekedar sebagai input produksi. Lebih jauh, kredit merupakan *a command over resources* yaitu suatu instrumen yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh akses atau memperluas kontrol

terhadap sumberdaya (Direktorat Pembiayaan, 2004). Bertambahnya kemampuan mengakses barang dan jasa dengan fasilitasi kredit merupakan potensi untuk meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) petani kecil terhadap pelaku ekonomi lainnya. Oleh karena itu, kredit juga merupakan faktor paling penting dalam pembangunan untuk memberdayakan pelaku agribisnis miskin. Hal ini sejalan dengan proposisi Todaro (2000) bahwa salah satu dari tiga strategi pembangunan pedesaan dan pertanian adalah adanya dukungan pemerintah terhadap suatu sistem yang dapat menciptakan insentif, kesempatan ekonomi, dan akses terhadap kredit dan input produksi sehingga pelaku agribisnis kecil dapat meningkatkan produktivitas dan produksinya.

Fungsi kredit yang sangat strategik dalam pembangunan pertanian dan pedesaan, telah mendorong pemerintah di banyak negara menjadikannya sebagai salah satu instrumen kebijakan penting untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku agribisnis. Pertimbangannya, menurut Tampubolon (2002) adalah karena kredit dianggap sebagai salah satu alat yang di anggap sanggup memutus “lingkaran setan” dari pendapatan rendah, yang lalu secara berturut – turut menyebabkan kemampuan memupuk modal rendah, kemampuan membeli saran produksi rendah, produktivitas usahatani rendah, dan pendapatan rendah.

Rendahnya alokasi kredit untuk sektor pertanian, selain karena faktor resiko yang tinggi juga disebabkan oleh sistem pembiayaan di perbankan yang tidak membedakan antara sektor pertanian dan nonpertanian. Dengan demikian tidak ada perlakuan khusus untuk sektor pertanian, misalnya tingkat suku bunga, sistem penyaluran, dan sistem pengembalian. Jika sistem penghitungan usaha pada sektor non pertanian (terutama industri dan jasa) diterapkan untuk usaha pertanian, maka hasilnya cenderung *over estimate*. Apabila dipaksakan menyebabkan usaha pertanian tidak akan mendapat dukungan kredit dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan (Ashad dan Saptana, 2005). Memang telah ada perbankan yang melakukan *treatment* khusus dalam penyaluran kredit di sektor pertanian, yaitu dengan skim pembiayaan musiman (4 bulan, 6 bulan, 12 bulan) seperti yang di rintis oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Namun demikian, dibandingkan dengan kebutuhan dana untuk sektor pertanian yang sangat besar serta luas cakupannya, maka jumlah alokasi penyaluran kredit dengan skim pola musiman ini masih sangat terbatas jumlahnya.

2.1.1 Isu Penting Fungsi Intermediasi Perbankan di Sektor Pertanian

Freixas and Rochet (2001) memiliki tiga pendekatan dalam diskusi literatur terkait dengan aktivitas perbankan: Pendekatan produksi (*the production approach*), pendekatan intermediasi (*the intermediation approach*) dan pendekatan modern (*the modern approach*). Dua pendekatan

pertama mengaplikasikan teori perusahaan mikro ekonomi tradisional pada industri perbankan dan berbeda hanya pada spesifikasi dari aktivitas banknya. Pendekatan yang ketiga melangkah lebih jauh dan memasukkan beberapa aktivitas spesifik dari bank ke dalam teori klasik yang kemudian dimodifikasi.

Dalam pendekatan produksi, aktivitas bank dideskripsikan sebagai sebuah produksi jasa bagi para nasabah penyimpan dan peminjam kredit/pembiayaan. Faktor-faktor produksi tradisional seperti tanah, tenaga kerja dan modal digunakan sebagai input untuk memproduksi output-output yang diinginkan. Meskipun pendekatan ini mengenali sifat multiproduk dan aktivitas perbankan, studi-studi sebelumnya kurang memperhatikan aspek-aspek dan produk perbankan tersebut.

Pendekatan produksi ini diperkuat oleh Nuryakin dan Warjiyo (2005) yang menyatakan bahwa kegiatan operasional bank, secara umum, adalah suatu proses produksi dimana input bagi proses tersebut adalah dana simpanan masyarakat sedangkan output yang dihasilkan adalah kredit/pembiayaan. Dengan melaksanakan proses produksi ini, bank telah memerankan fungsinya sebagai mediator dari kepentingan pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana, Nuryakin dan Warjiyo (2005).

Lending Capacity adalah ukuran kemampuan sebenarnya dari perbankan untuk menyalurkan kredit/pembiayaan. Variabel ini digunakan karena berdasarkan fakta tidak semua dana yang diserap oleh perbankan dapat disalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan. Kemudian pengertian "*Total Loan*" adalah total realisasi kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di daerah, termasuk kredit/pembiayaan yang telah dihapus bukukan pada periode yang bersangkutan. Sementara pengertian "*Real Loan*" adalah jumlah keseluruhan kredit/pembiayaan yang disalurkan di suatu daerah berdasarkan lokasi proyek (baik yang disalurkan oleh bank yang berlokasi di daerah tersebut, maupun bank yang ada di luar daerah).

2.1.2 Pasar Kredit Pertanian

a. Fungsi Permintaan Kredit

Dalam ekonomi mikro, fungsi permintaan barang secara teoritis diperoleh dari maksimisasi utilitas dengan kendala faktor tertentu, misalkan pendapatan dan harga barang lainnya telah ditetapkan (*given*), Henderson dan Quant (1980). Dalam hal ini, jumlah barang yang diinginkan akan sangat tergantung dari harga barang tersebut (misalkan harga barang sebagai salah satu variabelnya). Dengan mengetahui harga barang tersebut, maka kuantitas barang yang diinginkan dapat ditentukan dari fungsi permintaannya.

Demikian pula dengan permintaan kredit oleh nasabah, variabel harga atau suku bunga (dalam pasar kredit) tentu akan sangat mempengaruhi jumlah kredit yang diminta. Apabila suku bunga menurun, maka jumlah kredit yang diminta (yang secara luas direpresentasikan juga dalam bentuk investasi) akan meningkat. Sebaliknya, apabila suku bunga meningkat, maka jumlah kredit yang diminta akan menurun.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa permintaan kredit bank, selain dipengaruhi suku bunga, juga sangat tergantung pada perhitungan apakah dana pinjaman yang diterima dari bank (tambahan investasi) dapat meningkatkan pendapatan/nilai debitur atau tidak. Peningkatan pendapatan ini sangat terkait dengan pemenuhan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur pada bank, yang ditunjukkan dengan produk marjinal dari kapital yang lebih besar dari pada total depresiasi dan suku bunga yang akan dibayar. Apabila nilai depresiasi dan suku bunga yang akan dibayar. Apabila nilai depresiasi dan suku bunga lebih besar daripada produk marjinal kapital, maka kredit yang diperoleh nasabah justru akan menjadi beban bagi debitur, sehingga dapat dipastikan permintaan akan kredit/investasi akan semakin menurun. Sementara itu, apabila dievaluasi lebih lanjut, selain faktor suku bunga (harga) ternyata masih terdapat faktor-faktor lain yang juga sangat menentukan jumlah

kredit yang diinginkan oleh nasabah, seperti aktivitas perekonomian, kondisi internal perusahaan dan faktor nonekonomi lainnya (antara lain keamanan, politik, atau gejolak buruh).

b. Fungsi Penawaran Kredit

Faktor eksternal yang menyebabkan penawaran kredit menurun, antara lain: (1) Kondisi keuangan debitur yang melemah sehingga tingkat kepercayaan bank kepada debitur (*creditworthiness*) menurun: (2) Penutupan sejumlah bank mengakibatkan perilaku perbankan menjadi semakin *risk averse* yaitu lebih ketat dan konservatif dalam menyalurkan kredit (Grabbe, 1998), karena biaya kebangkrutan (*bankruptcy costs*) yang harus ditanggung oleh pemilik bank ternyata sangat besar.

Dalam situasi tertentu, ketika bank sulit membedakan *creditworthiness* dari para debitur, bank dapat menurunkan penawaran kredit melalui *non price credit rationing*. Adapun bentuk *non price credit rationing* antara lain adalah pengetatan kriteria debitur yang dapat memperoleh kredit, pelarangan pemberian kredit untuk sektor tertentu (seperti properti atau pembelian saham), dan pemberian kredit hanya untuk kelompok debitur tertentu saja (usaha menengah dan kecil), juga termasuk faktor nonekonomi seperti krisis atau ketegangan politik dan keamanan. Dalam pengamatan Grant (2001) di Amerika ditemukan, bahwa perbankan (*lender*) tidak ingin

memberikan kredit kepada kaum marjinal karena dianggap kemampuan pelunasannya tidak cukup bagus. Selain itu, tingkat pendidikan, etnis, dan status (nikah/tidak) juga dapat menjadi pembatas (*constraints*) bagi rumah tangga dalam memperoleh kredit.

Penetapan suku bunga kredit/pembiayaan dilakukan atas dasar risiko yang terkandung dalam proyek yang akan dibiayai, yang seharusnya juga merupakan ekuilibrium antara permintaan dengan penawaran kredit/pembiayaan. Sementara, untuk mengetahui risiko yang ada, diperlukan informasi yang cukup. Oleh karena itu, efektivitas suku bunga dalam menyeimbangkan pasar kredit/pembiayaan sangat tergantung kepada informasi mengenai debitur/proyek yang akan dibiayai. Namun dalam kenyataannya, informasi tersebut sulit diperoleh bank secara akurat dan bebas karena adanya *asymmetric information* (informasi yang asimetris). Informasi yang asimetris ini menunjukkan bahwa informasi yang diterima oleh bank (pemberi kredit/pembiayaan) tidak menggambarkan secara menyeluruh dan lengkap mengenai resiko proyek yang akan dibiayai, termasuk mengenai kepastian debitur mengembalikan kredit/pembiayaannya. Jadi debitur lebih mengetahui dibandingkan bank mengenai resiko yang terkandung dalam proyek yang diajukannya. Informasi yang asimetris ini, menurut Stiglitz dan Weiss (1981) mengakibatkan pihak bank melakukan penjatahan (*rationing*) atas kredit/pembiayaan yang diberikannya.

Kondisi *asymmetric information* (disebut juga *imperfect condition*) dan *adverse selection*, telah menyebabkan terjadinya disequilibrium antara jumlah kredit/pembiayaan yang diminta dan jumlah kredit/pembiayaan yang ditawarkan sebagai akibat bank menerapkan *rationing*. Selanjutnya akan ada unsur rigiditas dalam suku bunga kredit/pembiayaan yang ditandai dengan kelebihan permintaan atau penawaran kredit/pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa pasar kredit/pembiayaan selalu dalam keadaan disequilibrium. Dengan demikian, keberadaan disequilibrium akan sangat tergantung dari fleksibilitas suku bunga kredit/pembiayaan dalam menyeimbangkan pasar kredit/pembiayaan, Hurlin dan Kierzenkowski (2003). Lebih lanjut menurut Berger dan Udell (1992), penyesuaian yang lambat dari suku bunga pinjaman merupakan hasil dari komitmen awal yang telah ditandatangani oleh peminjam dan bank karena suku bunga bank adalah *price setting* bukan *auction based price*. Terkait dengan rigiditas, hasil penelitian Bernanke (1983) juga menunjukkan bahwa permintaan kredit/pembiayaan (*demand for credit*) relatif lebih stabil daripada permintaan uang (*money demand*).

Berdasarkan landasan teori mengenai kredit/pembiayaan, intermediasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peran intermediasi perbankan dalam mendorong kinerja sektor pertanian dipengaruhi baik dari sisi

penawaran dana (perbankan) maupun dari sisi permintaan (dunia usaha/sector pertanian). Kedua sisi tersebut saling terkait dan mempengaruhi kinerja sektor pertanian.

Pada sisi perbankan, sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya, kinerja intermediasi dipengaruhi oleh kemampuan perbankan menyalurkan kredit/pembiayaan dan kinerja pembiayaan perbankan kepada sektor produktif. Sementara dari sisi sektor pertanian, kinerja perusahaan yang baik adalah yang mampu melakukan ekspansi usaha.

2.1.3 Beberapa Isu Terkait Instrumen Kebijakan Moneter

Berfluktuasinya pertumbuhan kredit perbankan pada sektor pertanian diduga terjadi karena melemahnya permintaan kredit, melemahnya penawaran, atau keduanya. Pada sisi permintaan dapat berupa rendahnya pertumbuhan PDB, kurs Rupiah terhadap USD, tingginya suku bunga, dan inflasi.

Kapasitas kredit atau *lending capacity* adalah merupakan *total liabilities* dikurangi dengan Giro Wajib Minimum (GWM), *Cash in Vault* dan Modal, Riyadi (2003); Humpel et all (1994); Hubbard (2001).

Mishkin dan Stanley (2000) mengemukakan bahwa Giro Wajib Minimum (GWM) adalah sejumlah dana yang harus disetorkan bank kepada bank sentral atas setiap unit deposito yang diterimanya. Besarnya GWM sangat tergantung kepada persentase (*reserve requirement ratio*, disingkat RRR) yang ditetapkan bank sentral. Makin besar RRR yang ditetapkan bank sentral, maka makin kecil daya ekspansi kredit bank sentral. Dilema yang dihadapi bank Umum berkaitan dengan GWM adalah disatu sisi mereka harus menaati ketentuan ini. Jika tidak, bank sentral akan melakukan tindakan dan hal ini akan menurunkan citra bank yang bersangkutan. Tetapi setoran GWM akan menurunkan daya ekspansi kredit oleh bank, yang berarti menurunkan kemampuan menghasilkan pendapatan bunga. Langkah yang paling baik adalah bank menaati peraturan tersebut, tetapi harus diupayakan supaya GWM tidak terlalu jauh di atas ketentuan bank sentral agar dana yang tidak terpakai efektif menjadi lebih sedikit.

Cadangan kas (*Cash Vault*) atau tujuan utama penyediaan cadangan kas (*cash vault*) dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang menarik uang tunai. Besarnya cadangan kas yang dibutuhkan sangat bervariasi antara bank yang satu dengan bank lainnya, Humpel et al (1994); Hubbar (2001).

Adapun tinjauan makro dari masing-masing variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap aspek permintaan dan penawaran kredit disajikan sebagai berikut :

a. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk domestik bruto (*gross domestic product, GDP*) adalah total nilai atau harga pasar (*market prices*) dari seluruh barang dan jasa akhir (*final goods and services*) yang dihasilkan oleh suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya 1 tahun). Output nasional (PDB atau GDP) merupakan salah satu faktor yang sangat signifikan mempengaruhi permintaan kredit perbankan. Semakin besar output nasional maka semakin besar pula permintaan kredit. Produk domestik bruto juga merupakan salah satu ukuran atau indikator yang secara luas digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi (*economic performance*) atau kegiatan makroekonomi dari suatu negara, Manurung. (2004) dan Muana (2005).

b. Nilai Tukar (Kurs)

Nilai tukar atau kurs adalah harga dari mata uang suatu negara berdasarkan mata uang negara lain. Kenaikan nilai kurs ditandai dengan terjadinya depresiasi (melemahnya Rupiah terhadap USD), menyebabkan meningkatnya pendapatan ekspor yang berujung pada minimnya kebutuhan dana/kredit. Hal ini menunjukkan bahwa kurs berpengaruh negatif terhadap

permintaan kredit. Di sisi lain otoritas Bank akan menurunkan jumlah uang yang beredar ketika kurs naik, dan dengan asumsi permintaan kredit lebih besar dari penawaran kredit dan penurunan jumlah uang yang beredar lebih kecil dari penurunan kebutuhan dana/kredit maka gap kredit akan menurun, Manurung M. (2004) dan Muana (2005).

Teori *keynesian* menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara kurs valas dan suku bunga nominal. Perubahan suku bunga nominal merupakan refleksi dari kebijakan uang ketat (*tight money policy*) oleh pemerintah. Saat penawaran uang lebih banyak daripada permintaan, maka otoritas moneter akan melakukan kebijakan uang ketat dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga akan meningkatkan arus kapital (*capital inflow*) yang akan berdampak positif pada apresiasi kurs domestik, Zulkifli (2008).

c. Inflasi

Inflasi (*inflation*) adalah suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus. Vieries dan Sebold (1977), mendefinisikan inflasi sebagai suatu kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum secara terus menerus sepanjang waktu (*a sustained tendency for the general level of prices over time*).

Inflasi memiliki hubungan positif dan signifikan dengan permintaan kredit. Inflasi yang mencerminkan ekspektasi terhadap kenaikan harga-harga relatif barang dan jasa di masa datang akan menyebabkan kenaikan jumlah kredit yang diminta oleh pelaku usaha di sektor pertanian, Harmanta dan Ekananda (2003).

d. *Suku Bunga*

Pada prinsipnya tingkat bunga adalah harga atas penggunaan uang atau sebagai sewa atas penggunaan uang dalam jangka waktu tertentu, Jafar (1993); Boediono (1992); Rusjdin (1997); Samuelson dan Nordhaus (1997); Kasmir (2004).

Menurut teori klasik, tabungan adalah fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. Artinya, pada tingkat bunga yang lebih tinggi masyarakat akan lebih terdorong untuk mengorbankan/mengurangi pengeluaran untuk konsumsi guna menambah tabungan Harris (1981) dan Laidler (1985).

Investasi juga merupakan fungsi di tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga, keinginan untuk melakukan investasi juga makin kecil. Alasannya, seorang pengusaha termasuk pelaku agribisnis akan menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi lebih besar dari pada tingkat bunga yang harus dia bayar yang merupakan ongkos atas

dana yang digunakan (*cost of capital*). Makin rendah tingkat bunga maka pengusaha pelaku agribisnis akan lebih terdorong untuk melakukan investasi, sebab biaya penggunaan dana juga makin kecil. Tingkat bunga dalam keadaan keseimbangan akan tercapai apabila keinginan menabung masyarakat sama dengan keinginan pengusaha untuk melakukan investasi.

Dalam teori Fisher mengenai *Loanable Fund Theory*, dikatakan bahwa tingkat suku bunga umumnya ditentukan oleh interaksi antara faktor permintaan dan penawaran dana. Faktor pertama, adalah permintaan dana berhubungan negatif dengan suku bunga, dimana kenaikan suku bunga akan mengurangi permintaan pinjaman oleh perusahaan dan individu (dengan asumsi semua faktor ekonomi yang lain konstan), karena proyek-proyek dinilai semakin tidak menguntungkan. Faktor yang kedua, adalah penawaran dana berhubungan positif dengan suku bunga, dimana perusahaan dan individu akan terdorong untuk menabung apabila suku bunga meningkat, sehingga bank-bank cenderung untuk memberikan pinjaman yang lebih banyak, Harris (1985) dan Laidler (1985).

Keynes seperti dalam bukunya "*General Theory of Employment, Interest and Money*", yang ditulisnya pada tahun 1936, menyatakan bahwa permintaan akan uang mempunyai hubungan negatif dengan tingkat bunga. Teori Neo-Klasik (*Loanable Funds*) dimana merupakan

penyempurnaan teori sebelumnya terutama teori klasik. Teori ini juga membahas tentang adanya *opportunity cost of holding money* seperti yang dijelaskan dalam teori Keynes. Teori penentuan tingkat bunga *Loanable Funds* ini menjelaskan bahwa disamping tabungan dan investasi, hasrat untuk memiliki uang kas dan jumlah uang beredar sangat menentukan tingkat bunga, Harris (1985) dan Laidler (1985).

e. Modal

Modal memiliki banyak arti yang berhubungan dalam ekonomi, finansial, dan akunting. Dalam finansial dan akunting, modal biasanya menunjuk kepada kekayaan finansial, terutama dalam penggunaan awal atau menjaga kelanjutan bisnis. Awalnya, dianggap bahwa modal lainnya, misal modal fisik, dapat dicapai dengan uang atau modal finansial.

Dengan modal yang semakin kecil, berarti kemampuan bank menyalurkan kredit juga semakin kecil. Bilamana modal bank kurang dari ketentuan standar, maka bank harus mengurangi portofolio kreditnya atau melakukan substitusi dengan memegang surat berharga atau obligasi Pemerintah yang aman/*risk free* (Suzuki, 2002)

Rasio kecukupan modal ialah rasio dalam sistem perbankan yang digunakan untuk melihat kesehatan bank, khusus modal bank untuk risiko serta menentukan kapasitas bank dalam hal memenuhi kewajiban waktu dan risiko lain seperti risiko kredit dan risiko pasar

f. Non Performing Loan (NPL)

Kelangsungan hidup perbankan sangat tergantung pada kualitas kredit yang ada karena pendapatan bank sangat terkait dengan NPL bank. Semakin kecil NPL bank berarti semakin besar pendapatan (profit) yang diperoleh bank dan semakin sehat kondisi bank tersebut sehingga semakin besar pula kemampuan bank menawarkan kredit, Pazarbasioglu (1997).

Kredit yang disalurkan dikatakan bermasalah jika pengembaliannya terlambat dibanding jadwal yang direncanakan, bahkan tidak dikembalikan sama sekali. Dalam konteks Indonesia, kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) dapat dikelompokkan menjadi kredit tak lancar dan kredit macet, Manurung dan Rahardja (2004).

2.2 Kerangka Konseptual Penelitian

Pembangunan pertanian tidak berbeda dengan pengembangan sektor lainnya yang membutuhkan suatu pola pendanaan yang konsisten dan sistematis seperti dipahami bahwa sektor pertanian sangat memiliki faktor risiko yang sangat tinggi termasuk sangat tergantung pada faktor

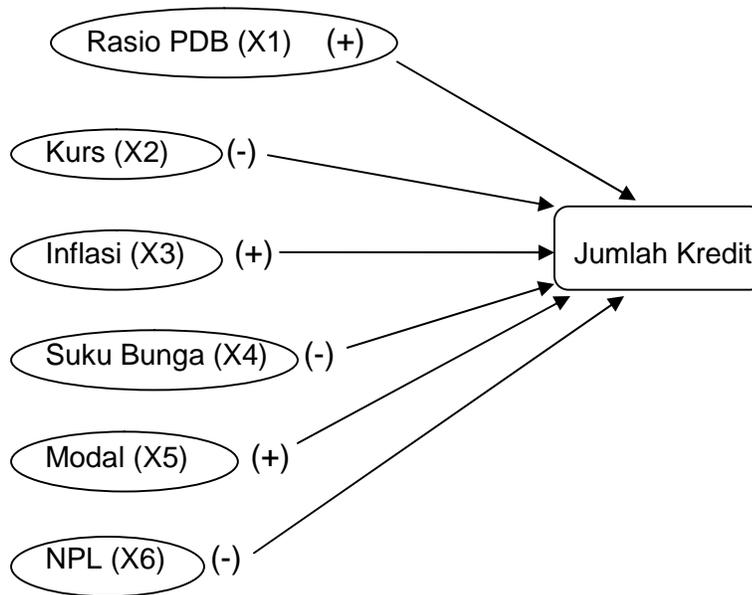
alam. Dengan demikian sisi penyedia dana dipahami dapat memiliki suatu tingkat keengganan tertentu dalam penyaluran kredit misalnya.

Kredit seperti komoditas atau aktifitas lainnya juga tergantung pada mekanisme pasar yaitu permintaan dan penawaran. Untuk pasar kredit sektor pertanian, bahkan juga berlaku pada sektor pertanian selalu terjadi ketidakseimbangan. Salah satu penyebabnya adalah adanya *asymmetric information*.

Indonesia sebagai negara agraris dalam proses pembangunan ekonominya tidak bisa terlepas atau mengabaikan kinerja sektor pertanian. Berbagai kebijakan makroekonomi yang diarahkan untuk pembangunan ekonomi di Indonesia perlu dievaluasi termasuk dampaknya pada pengembangan sektor pertanian. Pada kajian ini sangat diarahkan untuk mengamati bagaimana dampak berbagai instrumen kebijakan moneter dan variabel kinerja makroekonomi lainnya terhadap pengembangan sektor pertanian dengan fokus pada masalah pasar perkreditan di sektor pertanian.

Secara singkat, kerangka konseptual penelitian ini dapat disimak pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian



Kurs juga akan mempengaruhi jumlah kredit sektor pertanian, apabila kurs naik dalam hal ini terjadi depresiasi (Rupiah melemah terhadap USD), akan menyebabkan jumlah kredit sektor pertanian akan turun. Artinya dari sisi permintaan, apabila kurs naik dengan asumsi sektor pertanian adalah sektor ekspor akan memperoleh Rupiah lebih banyak dari pendapatan ekspor (USD), akan menyebabkan turunnya kebutuhan dana atau permintaan kredit sektor pertanian. Dari sisi penawaran, dengan naiknya kurs maka otoritas moneter akan mengurangi jumlah uang beredar atau menurunkan kredit. Akibatnya jumlah kredit sektor pertanian akan turun

dengan asumsi penurunan penawaran kredit sektor pertanian lebih kecil dari penurunan permintaan kredit sektor pertanian. Karenanya pengaruh kurs terhadap nilai jumlah kredit sektor pertanian adalah negatif.

Hubungan inflasi terhadap jumlah kredit sektor pertanian secara teoritis adalah positif. Hal ini dapat diamati dari dua sisi (penawaran dan permintaan). Dari sisi permintaan, apabila apabila inflasi naik kebutuhan dana naik, permintaan kredit sektor pertanian naik, sementara dari sisi penawaran, dengan asumsi otoritas moneter akan mengendalikan atau menekan inflasi dengan menurunkan jumlah uang beredar yang berarti penawaran kredit sektor pertanian turun. Efek total permintaan naik dan penawaran turun maka jumlah kredit sektor pertanian akan naik.

Hubungan suku bunga kredit terhadap jumlah kredit sektor pertanian adalah negatif yaitu apabila suku bunga naik maka permintaan kredit sektor pertanian menurun, dengan asumsi penawaran kredit sektor pertanian tetap maka jumlah kredit sektor pertanian menurun.

Modal perbankan dalam hal ini CAR (*Capital Adequacy Ratio*) akan berpengaruh positif terhadap jumlah kredit sektor pertanian. Artinya apabila CAR naik maka perbankan diasumsikan dapat menambah jumlah kredit, penawaran kredit sektor pertanian naik dengan asumsi permintaan kredit sektor pertanian tetap.

Untuk hubungan NPL (*Non Performing Loan*) atau tingkat kredit macet juga akan berpengaruh negatif terhadap nilai ketidakseimbangan pasar kredit sektor pertanian yaitu apabila NPL naik maka perbankan akan mengurangi penawaran kredit sektor pertanian dengan asumsi permintaan kredit sektor pertanian tetap.

Hubungan variabel-variabel di atas dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan tunggal atau *single equation* sebagai berikut :

$$Y = f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) \dots \dots \dots 2.2$$

$\begin{matrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ + & - & + & - & + & - \end{matrix}$

Dimana :

Y : Jumlah Kredit

x₁ : Rasio PDB (Produk Domestik Bruto) Sektor Pertanian

x₂ : Kurs

x₃ : Inflasi

x₄ : Suku bunga

x₅ : Modal

x₆ : NPL

2.3 Hipotesis Penelitian

⇒ Diduga bahwa Rasio Produk Domestik Bruto (PDB), Modal dan Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah Kredit Sektor Pertanian di Indonesia. Sedangkan Kurs, Suku Bunga dan NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah Kredit Sektor Pertanian di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini bertujuan untuk menguraikan tentang semua hal yang berkaitan dengan operasional (cara) dan peralatan analisis yang digunakan serta konsep dan gambaran awal tentang pelaksanaan penelitian. Untuk itu, Bab ini membahas tentang teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan definisi operasional.

3.1 Teknik Pengumpulan Data : Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia dan Biro Pusat Statistik (BPS), dimana hampir seluruh data keuangan diperoleh dari Bank Indonesia. Estimasi, analisis dan penelitian dilakukan dengan menggunakan data kuartal mulai dari kuartal I (Maret) Tahun 2006 sampai dengan kuartal IV (Desember) Tahun 2012 dengan lokasi penelitian adalah wilayah Indonesia secara keseluruhan.

Pemilihan periode 2006 – 2012 ini disebabkan pada periode ini, perekonomian Indonesia telah masuk pada tahap perkembangan dan pemulihan pasca krisis dan cenderung membaik dari tahun ke tahun. Namun begitu, membaiknya perekonomian ini justru menyebabkan sektor pertanian kurang diperhatikan. Oleh karena itu cukup menarik untuk mengkaji lebih

dalam perkembangan sektor pertanian dalam hal ini masalah perkreditan pada periode yang telah disebutkan di atas.

Data yang diperoleh dari Bank Indonesia antara lain, posisi kredit Bank Umum sektor pertanian, nilai tengah kurs Rupiah terhadap US Dollar, suku bunga kredit modal kerja dan suku bunga kredit investasi Bank Umum dan tingkat inflasi. Adapun data yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik adalah data PDB sektor pertanian.

3.2 Metode Analisis Data

Berdasarkan kerangka pikir yang telah dikemukakan sebelumnya, maka model analisis data adalah sebagai berikut :

$$Y = f (X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6) \dots \dots \dots (3.2)$$

Dimana :

Y : Jumlah kredit, diukur dengan posisi kredit Rupiah Bank Umum yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha sektor pertanian maupun yang ditawarkan oleh pihak perbankan

x_1 : Rasio PDB sektor pertanian, diperoleh dengan menghitung persentase PDB sektor pertanian atas total PDB dengan harga konstan tahun 2000 yang diukur dalam persen agar dapat diregresi dengan baik.

x_2 : Kurs, diukur dengan nilai tengah kurs Rupiah terhadap US Dollar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia

x_3 : Inflasi, diukur dengan tingkat inflasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam persen

x_4 : Suku Bunga, diperoleh dengan menghitung nilai tengah suku bunga kredit modal kerja (KMK) atau harga sewa yang diberikan bank terhadap nasabah untuk memenuhi modal kerja nasabah dan suku bunga kredit investasi Bank Umum yang diukur dalam persen

x_5 : Modal, diukur dengan rasio kecukupan modal Bank Umum (CAR) dalam persen

x_6 : NPL (*Non Performing Loan*), diukur dengan rasio NPL terhadap total kredit Bank Umum dalam persen

Persamaan (3.2) di atas secara eksplisit dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi *cobb douglas* untuk menyamakan satuan data agar interpretasi nantinya dapat seragam, dimana fungsi *cobb douglas* sebagai berikut :

$$Y = \alpha_0 x_2^2 e^{(\alpha_1 x_1 + \alpha_3 x_3 + \alpha_4 x_4 + \alpha_5 x_5 + \alpha_6 x_6 + \mu)} \dots\dots\dots(3.2.a)$$

Persamaan non linear (3.2). selanjutnya dapat ditransformasi menjadi linier dalam bentuk logaritma natural (ln) seperti pada persamaan estimasi regresi linear berikut :

$$\ln Y = \ln_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \mu \dots \dots \dots (3.2.b)$$

Dimana :

$\ln Y$: Logaritma natural jumlah kredit

\ln : Logaritma natural

\ln_0 : Konstanta

β_1, \dots, β_6 : Parameter yang akan diestimasi

e dan μ : Bilangan natural dan Kesalahan random

3.3 Definisi Operasional

Untuk mempersamakan pengertian istilah-istilah dan memudahkan dalam pengumpulan dan analisis data, maka variabel-variabel yang didefinisikan atau diukur dan dapat dijadikan sebagai acuan selama penelitian adalah :

1. Jumlah kredit (Y) adalah posisi kredit Rupiah Bank Umum yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha sektor pertanian maupun yang

ditawarkan oleh pihak bank. Data yang digunakan adalah data kuartal (miliar Rupiah) dari Tahun 2006 – 2012.

2. Rasio Produk Domestik Bruto (x_1) adalah rasio PDB sektor pertanian atas total PDB. Data yang digunakan adalah data kuartal dari Tahun 2006 – 2012.
3. Nilai tukar Rupiah (x_2) terhadap US Dollars adalah nilai tengah kurs Rupiah terhadap US Dollar. Data yang digunakan adalah data kuartal yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dari Tahun 2006 - 2012.
4. Inflasi (x_3) adalah data tingkat inflasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Data yang digunakan adalah data kuartal dari Tahun 2006 – 2012 yang diukur dalam persen.
5. Suku bunga kredit (x_4) adalah nilai tengah suku bunga kredit modal kerja (KMK) dan suku bunga kredit investasi Bank Umum. Data yang digunakan adalah data kuartal dari Tahun 2006 – 2012 yang diukur dalam persen.
6. Pemodal bank (x_5) adalah rasio kecukupan modal Bank Umum (CAR). Data yang digunakan adalah data kuartal dari Tahun 2006 – 2012 yang diukur dalam persen.
7. *Non Performing Loan* (x_5) adalah rasio NPL terhadap total kredit Bank Umum. Data yang digunakan adalah data kuartal dari Tahun 2006 – 2012 yang diukur dalam persen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pada Bab ini diarahkan untuk memberikan gambaran hasil-hasil penelitian, pada sektor perbankan, terutama terkait dengan masalah pembiayaan pada sektor pertanian. Dengan kata lain tujuan utama dari Bab ini adalah dimaksudkan untuk menyajikan apa, bagaimana, kenapa dan implikasi temuan-temuan pokok penelitian tentang pasar kredit di sektor pertanian.

Pembahasan ini diawali dengan menyajikan kebijakan pemerintah dalam pengembangan kredit sektor pertanian, pengaruh kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan kredit sektor pertanian, dan gambaran umum perekonomian dan sektor pertanian dengan fokus pada masalah perkreditan di sektor pertanian. Bagian selanjutnya menyajikan pembahasan hasil estimasi fungsi Jumlah kredit sektor pertanian.

4.1 Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Kredit Sektor Pertanian

Sesuai dengan cita-cita negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan

masyarakat yang adil dan makmur yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Amanat Undang Undang Dasar 1945 perubahan keempat, dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran seorang saja. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran untuk rakyat. Dari amanat Undang Undang Dasar 1945 ini, terkandung makna bahwa perumus konstitusi menghendaki terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan dalam demokrasi ekonomi yang menuntut peran Negara melalui kebijakan-kebijakannya untuk selalu berpihak pada peningkatan taraf hidup rakyat.

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 tersebut, maka sudah menjadi tugas dan kewajiban negara dengan mengoptimalkan peranan pemerintah melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif yang ditetapkan melalui peraturan perundangan-undangan sebagai sarana yang paling efektif untuk mengimplementasikan kebijakan yang akan mengatur dan mendukung kehidupan ekonomi nasional, karenanya perundang-undangan merupakan instrumen kebijakan politik negara.

Dengan ambruknya pemerintahan orde baru, telah melahirkan pemikiran untuk mengkaji ulang kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dilaksanakan. Salah satu topik yang menjadi perbincangan yang cukup hangat sampai saat ini adalah dimunculkannya kembali isu ekonomi kerakyatan. Pemerintah sebagai pengganti pemerintahan Soeharto kelihatannya secara lebih konkret mencoba melontarkan kembali system ekonomi ini melalui berbagai kebijakannya, walaupun sebenarnya yang dilaksanakan pada dasarnya lebih bersifat memanjakan bukan memberdayakan.

Walaupun demikian lontaran tersebut melahirkan berbagai tanggapan baik yang pro maupun yang kontra . Pihak yang mendukung berpendirian bahwa pilihan ini lebih sesuai dengan kondisi dan system kerakyatan Indonesia. Sebaliknya pihak yang kontra kuatir bahwa pelaksanaan sistem ini akan mematikan perusahaan besar sehingga pertumbuhan ekonomi sulit dicapai serta dianggap tidak sejalan dengan prinsip pasar bebas.

Upaya untuk memberantas kemiskinan dengan memacu pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada pengusaha besar telah mengakibatkan pengusaha ekonomi golongan ekonomi menengah dan kecil terabaikan, padahal secara kuantitas pengusaha skala menengah dan kecil mencakup sebagian besar rakyat Indonesia.

Disamping berdasarkan pengalaman dalam menghadapi krisis ekonomi sebagaimana yang telah terjadi, ternyata justru pengusaha ekonomi menengah dan kecil lebih dapat tumbuh dan bertahan dalam menghadapi krisis tersebut.

Untuk menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan membuka peluang usaha yang seluas-luasnya, maka bantuan fasilitas dari negara harus diberikan secara selektif dan transparan, terutama dalam bentuk kemudahan dalam mengakses permodalan dan lokasi berusaha pada masyarakat secara luas, sehingga tidak terjadi pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu pada sekelompok kecil masyarakat.

Dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, dalam bidang pembangunan ekonomi nasional antara lain dinyatakan “ Upaya mengatasi krisis ekonomi beserta dampak yang ditimbulkannya telah dilakukan melalui proses reformasi dibidang ekonomi, tetapi hasilnya belum memadai karena penyelenggara dibidang ekonomi selama ini dilakukan atas dasar kekuasaan yang terpusat dengan campur tangan pemerintah terlalu besar, sehingga kedaulatan ekonomi tidak berada ditangan rakyat dan mekanisme pasar tidak berfungsi efektif dan kesenjangan ekonomi yang meliputi kesenjangan antara pusat dan daerah, antar daerah, antar pelaku, dan antar golongan pendapatan telah meluas keseluruh aspek kehidupan, sehingga struktur ekonomi tidak kuat ditandai

pemusatan kekuatan ekonomi ditangan sekelompok kecil masyarakat dan daerah tertentu.

Sejalan dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2005-2025 disebutkan bahwa Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip Demokrasi Ekonomi yang memperhatikan kepentingan nasional sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan kebijakan perekonomian perlu memperhatikan secara cermat dinamika globalisasi, komitmen nasional di berbagai pola perjanjian ekonomi nasional, dan kepentingan nasional dengan mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah, serta menjaga kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa.

Dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2007 disebutkan pula peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, sekaligus sebagai katalisator pembangunan diberbagai tingkat guna efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif berdaya saing, dan terjaganya kelangsungan mekanisme pasar.

Negara melalui berbagai lembaga negara dan aparat pemerintah maupun melalui Perusahaan Negara dapat memainkan perannya, peran sebagai pioneer , pemberi contoh maupun perangsang mungkin harus dilaksanakan diberbagai sektor yang jauh dari keramaian atau sektor-sektor ekonomi yang kurang menarik.

Bagaimanapun juga peranan hukum yang dikeluarkan negara adalah sangat menentukan pembangunan ekonomi bangsa. Pengembangan sektor pertanian mencakup berbagai aspek, sehingga dalam pelaksanaannya terkait banyak faktor. Oleh karena itu pengembangan sektor pertanian dilaksanakan semua pihak secara bersama-sama melalui program-program yang telah terkoordinasi, karena sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis pada pembangunan nasional, baik sebagai penopang kebutuhan pangan nasional maupun sebagai penyerap tenaga kerja terbesar dibandingkan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha tani, maka pemerintah pada tahun 1999 telah menggulirkan Kredit Usaha Tani (KUT) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 486/KMK/017/1999 tanggal 13 Oktober 1999 untuk tahun anggaran 1999/2000. Program ini merujuk pada ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu pertanian sehingga pendapatan meningkat dan sekaligus meningkatkan taraf hidup petani, yaitu dengan memberikan kredit secara masal pada para petani.

Tujuan penyaluran KUT mengacu pada beberapa pertimbangan : *Pertama* ,tingginya komitmen pemerintah dalam pengembangan sector pertanian yang berbasis sumber daya seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan. *Kedua* sektor pertanian merupakan sektor ekonomi dominan terbesar ketiga yang membentuk PDB, *Ketiga* sektor pertanian merupakan

penyerap tenaga kerja terbesar dari total tenaga kerja yang ada. Dan *Keempat*, kebutuhan petani terhadap uang tunai (modal) untuk membiayai usaha taninya sangat menonjol dalam kegiatan pembelian benih dan sarana produksi pertanian.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja Kementerian Pertanian menggulirkan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, Gapoktan didampingi oleh Tenaga Penyuluh Pendamping..

Bertitik tolak dari permasalahan yang dihadapi petani, tujuan Program PUAP antara lain : *Pertama* : Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di pedesaan sesuai dengan potensi wilayah. *Kedua* : Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, Pengurus Gapoktan, dan Penyuluh Pendamping; *Ketiga* : Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis; *Keempat* : Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau

mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan. Adapun sasaran yang ingin dicapai ; *Pertama* : Berkembangnya usaha agribisnis di 10.000 desa miskin yang terjangkau sesuai dengan potensi pertanian desa; *Kedua* : Berkembangnya 10.000 Gapoktan/poktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani; *Ketiga* : Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan /atau penggarap)skala kecil, buruh tani; *Keempat* : Berkembangnya usaha agribisnis petani yang mempunyai siklus usaha harian, mingguan, maupun musiman.

4.2 Pengaruh kebijakan Bank Indonesia terhadap pengembangan sektor pertanian

Di negara berkembang seperti Indonesia ini kegiatan bank terutama dalam pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan Bank yang sangat penting dan terutama sehingga pendapatan dari kredit yang berupa bunga merupakan komponen pendapatan yang paling besar.

Dengan sudah tidak adanya Kredit Likuiditas Bank Indonesia ini,maka harus dipahami jika sumber dana perbankan yang dipinjamkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut bukan dana milik Bank sendiri karena modal perbankan juga sangat terbatas, tetapi merupakan dana-dana masyarakat yang disimpan pada Bank tersebut, sehingga perbankan berusaha dan berlomba-lomba menarik dana masyarakat agar bersedia menyimpan dananya pada Bank tersebut dengan berbagai undian, hadiah

dan iming-iming lainnya dengan tujuan semata-mata agar masyarakat menyimpan dananya dalam Bank dalam waktu yang lama.

Perkembangan tingkat suku bunga sangat berpengaruh terhadap perkembangan bank, disatu sisi dengan tingginya bunga simpanan, akan meningkatkan hasrat masyarakat untuk menabung. Disisi lain dengan suku bunga yang tinggi akan meningkatkan biaya dana bank yang pada gilirannya akan meningkatkan pula suku bunga pinjaman. Dana masyarakat yang disimpan pada Bank pada umumnya dalam bentuk Tabungan, Deposito, Giro dan lain-lain.

Dana masyarakat yang terkumpul dalam jumlah yang sangat besar dengan jangka waktu yang cukup lama merupakan sumber utama bagi Bank dalam menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan dalam bentuk pinjaman / kredit. Inilah yang dinamakan fungsi Bank sebagai **Intermeditasi**. Karena itu suatu bank yang tidak mempunyai sumber dana dari masyarakat yang memadai akan mengganggu usaha dan kegiatan bank dan bank juga tidak mampu memperluas ekspansi.

Belum optimalnya fungsi intermediasi perbankan masih terlihat dari tersendatnya / enggannya perbankan memberikan kucuran kredit pada sector riil, karena sektor ini dianggap masih rentan terhadap resiko, hal ini mengakibatkan fungsi intermediasi menjadi tidak maksimal, walaupun menurut catatan Bank Indonesia setiap tahun ada pertumbuhan baik dalam penghimpunan dana pihak ketiga maupun pertumbuhan kreditnya.

Menurut Burhanuddin Abdullah, Gubernur Bank Indonesia, belum optimalnya fungsi intermediasi perbankan nasional ini menjadi salah satu hal yang menghadapkan sektor riil pada sebuah fenomena yang paradoksal yang tidak bisa dihindari. Struktur ekonomi kita cenderung bergerak kearah perekonomian yang padat modal ketimbang perekonomian yang padat karya. Salah satu pemicu keengganan hubungan sektor keuangan dengan sektor riil adalah tingkat resiko dan distorsi yang menghambat investasi. Akibatnya perbankan enggan menyalurkan pembiayaan dan cenderung menempatkan dananya pada instrumen-instrumen yang beresiko rendah.

Dengan telah berlakunya Undang undang nomor 23 tahun 1999 yang diperbaruhi dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dimana dalam penjelasan Pasal 74 ayat (1) disebutkan “ Dengan berlakunya Undang Undang ini, Bank Indonesia tidak dapat lagi memberikan kredit likuiditas dalam bentuk kredit program” maka dalam masalah perkreditan justru fungsi pengawasan dan pembinaan yang lebih menonjol, hal ini sebagai upaya Bank Indonesia menjalankan fungsinya sebagai *agent of development* untuk meningkatkan peran intermediasi bank disatu sisi dan disisi lain tetap sebagai pembina dan pengawas perbankan dengan kebijakan-kebijakannya agar perbankan nasional tetap eksis sesuai tingkat kesehatan yang telah ditetapkan. Keberadaan Bank Indonesia memang sangat berperan dalam perbankan baik untuk lebih memperhatikan pada

sektor riil atau kredit produktif dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada sektor riil ini.

Dalam hal mendorong pengusaha golongan ekonomi lemah, kiranya perlu dicatat bahwa Bank Indonesia tetap memperhatikan golongan ekonomi lemah melalui penyediaan fasilitas kredit berprioritas tinggi yang mengandung unsur subsidi. Dalam hal hubungannya dengan penyediaan kredit kecil bagi para petani, kredit Bimas yang sepenuhnya didukung dengan likuiditas Bank Indonesia telah memberikan sumbangan nyata dalam meningkatkan produksi pangan, seperti tercermin pada swasembada beras pada era tahun 1984, dalam perkembangannya sejak April 1985 kredit Bimas digantikan dengan Kredit Usaha Tani (KUT). Tetapi hingga saat ini kredit program seperti KUT tersebut belum ada lagi.

Sebelum diberlakukannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pemberian kredit pada sektor-sektor yang dianggap penting oleh pemerintah termasuk sektor pertanian selalu menggandalkan pada berbagai skim kredit program yang sumber dananya didukung penuh dengan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), tetapi dengan berlakunya undang-undang tentang Bank Indonesia tersebut, maka Bank Indonesia yang tadinya sebagai *agent of development* sudah tidak lagi membiayai program program pemerintah.

Dengan demikian untuk pelaksanaan kredit diserahkan sepenuhnya pada bank pelaksana untuk menggali dana-dana murah baik dengan lembaga-lembaga pemerintah pusat maupun daerah, atau perusahaan BUMN yang mempunyai kepentingan dengan sektor pertanian.

Perbankan sendiri sebenarnya sudah menyediakan plafond kredit yang akan dikucurkan ke sektor riil pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya, tetapi permasalahannya perbankan sangat selektif dalam pengucurannya, karena belum berani dan enggan mengambil resiko untuk menyalurkan kreditnya ke sektor riil maupun sektor pertanian. Hal ini tampak pada tingginya pertumbuhan kredit pada sektor konsumtif, bahkan bank asingpun lebih banyak bermain pada sektor konsumtif ini dari pada membiayai sektor riil yang dianggapnya penuh resiko.

Seperti tersebut diatas bahwa sumber dana perbankan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit bukan dana milik bank sendiri tetapi dana yang berasal dari masyarakat, sehingga penyaluran kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, mengingat jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap, semua itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit yang meliputi pinjaman pokok dan bunga.

Apabila kredit yang telah di salurkan Bank kepada masyarakat dalam jumlah besar tidak dibayar kembali kepada bank tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit maka kualitas kredit dapat digolong kan menjadi **Non Performing Loan (NPL)** .

Jumlah NPL yang tinggi berakibat pada terganggunya likuiditas Bank yang bersangkutan .Kondisi likuiditas terganggu akibat meningkatnya kredit bermasalah (NPL), akan bertambah parah bila masyarakat yang menanamkan dana pada Bank tersebut tiba- tiba banyak yang menarik simpanannya dalam jumlah besar dan Bank harus membayar saat itu juga karena bank tidak boleh menunda nunda atau menolak akibatnya bank tersebut bisa mengalami kesulitan likuiditas.

Dengan Keputusan Diireksi Bank Indonesia Nomor 30/4/KEP/DIR tanggal 01 April 1993 yang mewajibkan kepada perbankan untuk menyediakan 20 % dari total kreditnya kepada usaha kecil dan pada tahun 1997 diubah menjadi 25 %. Kebijakan Bank Indonesia ini memacu bank untuk membiayai sektor-sektor riil yang berkenaan dengan usaha kecil akan tetapi keputusan ini telah dicabut dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001, dalam peraturan ini tidak ada lagi kewajiban bagi bank untuk menyediakan dana guna pembiayaan pada usaha kecil, untuk pembiayaan (kredit) diserahkan sepenuhnya pada kebijakan masing-masing bank.

Dengan penyerahan pada bank dalam rangka pembiayaan pada usaha kecil ini, justru menunjukkan ketidak konsistennya pemerintah dalam program pemberdayaan usaha kecil, memang masalah modal bukan merupakan segalanya dalam pengembangan usaha kecil, akan tetapi jika bertumpu pada modal perbankan, maka dengan mengacu pada peraturan tersebut bank akan semakin menjauhi dunia usaha kecil yang dianggap rentan akan resiko.

Dengan dicabutnya Kredit Likuiditas Bank Indonesia serta tidak adanya keharusan pada bank untuk menyalurkan kredit pada usaha kecil, disisi bank dalam pengucuran kreditnya mengacu pada asas kehati-hatian, maka sektor-sektor ekonomi yang dianggap resiko tinggi akan selalu dijauhi oleh dana perbankan, demikian juga sektor pertanian yang dianggap beresiko tinggi walaupun sampai saat ini sebagai penyerap tenaga kerja tersebar diantara semua sektor ekonomi yang ada.

Sejalan dengan berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta telah dicabutnya PBI No.3/2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK) maka diperlukan keberadaan ketentuan yang dapat mendorong peningkatan penyaluran kredit atau pembiayaan oleh Bank Umum kepada UMKM yang sekaligus mampu mendorong peningkatan akses UMKM kepada lembaga keuangan.

Dalam hal tersebut bentuk dukungan konkret Bank Indonesia dalam mendorong percepatan pengembangan dan keberpihakan kepada sektor UMKM sebagai salah satu pilar ekonomi yang sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional.

Maka Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.14/22/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dimana PBI berlandas hukum Dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa: a.Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (pasal 4)

Adapun pokok-pokok pengaturan dalam PBI meliputi: (i) Kewajiban bank umum untuk menyalurkan dananya dalam bentuk kredit/ pembiayaan kepada UMKM dengan pangsa sebesar minimal 20% secara bertahap. (ii) Pencapaian target kredit/pembiayaan kepada UMKM di atas dapat dipenuhi oleh bank umum baik dengan pemberian kredit/pembiayaan secara langsung dan/atau secara tidak langsung kepada UMKM.

4.3 Gambaran Umum Perekonomian dan Sektor Pertanian di Indonesia

Sejak awal tahun 2000-an, Indonesia berada pada tahap pemulihan dari krisis ekonomi. Meskipun beberapa indikator makro menunjukkan perbaikan, kondisi ketenagakerjaan dan kemiskinan masih belum membaik. Hal ini dapat disimak dan dijadikan indikator pada pengamatan terjadinya kecenderungan untuk mengabaikan sektor pertanian. Hal ini ditunjukkan pula dengan meningkatnya pengangguran terbuka, banyaknya tenaga kerja dengan upah rendah, dan posisi daya tawar tenaga kerja yang rendah pada semua sektor termasuk sektor-sektor di luar pertanian. Sebenarnya, penilaian keberhasilan yang dicapai suatu perekonomian bukanlah dengan pencapaian pertumbuhan yang setinggi-tingginya saja, melainkan harus disertai oleh penyerapan tenaga kerja dan penurunan tingkat kemiskinan. Untuk kaitan hal terakhir ini, sektor pertanian harus merupakan fokus atau acuan penilaian, terutama untuk kondisi perekonomian di Indonesia yang merupakan negara agraris.

Dari perspektif makro ekonomi, cara umum yang ditempuh untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan adalah dengan meningkatkan output. Untuk dapat meningkatkan output, terlebih dahulu pemerintah harus menciptakan kondisi perekonomian yang stabil sehingga dapat menarik kembali para investor ke Indonesia. Dengan cara berpikir seperti ini, dapat

diduga dan dijadikan tanda adanya kecenderungan untuk mengabaikan pertanian. Lebih jauh, beberapa studi menyebutkan bahwa Indonesia memiliki sistem birokrasi yang buruk, selain banyaknya kasus korupsi dan kekakuan aturan ketenagakerjaan. Selain itu, keberhasilan strategi peningkatan output untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan tergantung pada kemampuan perekonomian untuk menyerap tenaga kerja.

4.3.1 Perkembangan PDB Sektor Pertanian Indonesia (2006-2012)

Perkembangan rasio PDB sektor pertanian terhadap total PDB Indonesia (periode 2006 - 2012) dapat dilihat pada Tabel 4.3. Produk Domestik Bruto memang merupakan salah satu indikator makro yang dijadikan rujukan oleh pemerintah dalam penetapan kinerja sektor ekonomi secara Nasional. Pada kajian ini, output nasional PDB dalam hal ini rasio PDB sektor pertanian terhadap total PDB juga merupakan salah satu faktor yang dijadikan variabel utama dalam mempengaruhi jumlah kredit sektor pertanian.

Dari pengamatan pada Tabel 4.3, rasio PDB sektor pertanian terhadap total PDB berdasarkan data kuartal selama periode 2006-2012, mencatat angka 10,5% sampai 15,1%. Rasio tertinggi 15,1% tercapai pada kuartal III (September) 2007 dan rasio terendah 10,5% tercatat pada kuartal IV (Desember) 2012. Sesungguhnya rasio PDB sektor

pertanian terhadap total PDB ini berfluktuasi dari kuartal ke kuartal selama periode 2006-2012. Hal menarik untuk dicatat bahwa rasio PDB sektor pertanian terhadap total PDB ini selalu mencapai nilai terkecil pada kuartal IV (Desember) tiap tahunnya.

Tabel 4.3 Perkembangan Rasio PDB Sektor Pertanian Terhadap Total PDB Indonesia, Menurut Kuartal Periode 2006-2012

Tahun	Kuartal	PDB Sektor Pertanian (Miliar Rupiah)	Total PDB (Miliar Rupiah)	Rasio PDB Sektor Pertanian Terhadap Total PDB (%)
2006	Maret	66940,8	448501,1	14,92545
	Juni	66939,8	457776	14,62283
	September	71221,8	475049,3	14,99251
	Desember	57300,4	465966,5	12,29711
2007	Maret	65806,5	475824	13,83001
	Juni	70082,5	487102,9	14,38762
	September	76607,4	505957,6	15,14107
	Desember	59090,5	495089,8	11,93531
2008	Maret	69736,5	505218,8	13,8032
	Juni	74099,4	519204,6	14,2717
	September	79271	538641	14,7169
	Desember	61512,2	519391,7	11,8431
2009	Maret	73740	528057	13,9644
	Juni	76174	540678	14,0886
	September	81922	561637	14,5863

	Desember	64048	548479	11,6774
2010	Maret	76201	559279	13,6249
	Juni	78583	574539	13,6776
	September	83280	594069	14,0186
	Desember	66673,3	585950,8	11,3787
2011	Maret	79174	595785	13,2890
	Juni	81784	512200	13,3590
	September	85865	632828	13,5685
	Desember	68215	633864	10,9343
2012	Maret	82552	633243	13,0364
	Juni	85018	651107	13,0575
	September	90414	671781	13,4589
	Desember	69565	662008	10,5082

Sumber Data : Bank Indonesia setelah diolah, 2014

Kontribusi PDB sektor pertanian terhadap total PDB ini adalah berfluktuasi yang mana cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun (periode 2006-2012). Dari pengamatan tren kontribusi sektor pertanian yang menurun ini dapat memberikan indikasi keterkaitannya terhadap lemahnya potensi pendanaan pada sektor pertanian. Namun, dugaan seperti ini sangat perlu didukung oleh satu kajian. Untuk itu pula fungsi perbankan sebagai pendukung pendanaan inilah yang akan menjadi fokus bahasan selanjutnya.

4.3.2 Perkembangan Posisi Kredit pada Sektor Pertanian di Indonesia

Pertumbuhan posisi kredit Bank Umum sektor pertanian di Indonesia tahun 2006-2012 dapat dilihat pada Tabel 4.4. Posisi kredit sektor pertanian secara keseluruhan meningkat kecuali pada kuartal I (Maret) 2007, kuartal III (September) 2009, kuartal I (Maret) 2010 dan kuartal III (September) 2012 yang masing-masing mengalami penurunan sebesar -4,31%, -4,03%, -10,10%, dan -0,02%. Pertumbuhan posisi kredit sektor pertanian yang terbesar terjadi pada kuartal II (Juni) 2010, yaitu sebesar 17,67% atau meningkat dari Rp. 69,591 Miliar (kuartal I/Maret 2010) menjadi Rp. 81.890 Miliar, sebaliknya pertumbuhan yang lesu terjadi pada kuartal I (Maret) 2012, yaitu sebesar 0,31% atau meningkat dari Rp. 114.725 Miliar (kuartal IV/Desember 2011) menjadi Rp. 115.084 Miliar. Adapun nilai posisi kredit yang terbesar adalah pada kuartal IV (Desember) 2012 yaitu sebesar Rp. 142.451 Miliar dan yang terkecil adalah pada kuartal I (Maret) 2006 sebesar Rp. 36939.

Posisi kredit Bank Umum sektor pertanian yang sedikit berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (periode 2006-2012), sepertinya tidak sesuai dengan tren kontribusi PDB sektor pertanian terhadap total PDB yang sangat berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun (periode 2006-

2012). Contohnya secara keseluruhan, pada awal periode (kuartal I/Maret 2006) posisi kredit Bank Umum sektor pertanian sebesar Rp. 36.939 Miliar meningkat menjadi Rp. 142.451 Miliar pada akhir periode (kuartal IV/Desember 2012), sedangkan rasio PDB sektor pertanian terhadap total PDB sebesar 14,92% pada awal periode (kuartal I/Maret 2006), menurun menjadi 10,50% pada akhir periode (kuartal IV/Desember 2010). Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan antara perkembangan posisi kredit Bank Umum sektor pertanian (periode 2006-2012) dan perkembangan rasio PDB sektor pertanian terhadap total PDB (periode 2006-2012). Berdasarkan pengamatan di atas, temuan Manurung. (2004) dan Muana (2005) yang menyatakan bahwa output nasional berhubungan positif dengan permintaan kredit, tidak berlaku pada sektor pertanian selama periode 2006-2012.

Tabel 4.4 Pertumbuhan Posisi Kredit Bank Umum Sektor Pertanian di Indonesia Periode 2006-2012

Tahun	Kuartal	Posisi Kredit Rupiah Bank Umum Sektor Pertanian	
		Jumlah (Miliar Rp)	Pertumbuhan (%)
2006	Maret	36939	-
	Juni	38782	4,98
	September	40343	4,02
	Desember	45180	11,98
2007	Maret	43232	-4,31

	Juni	47028	8,78
	September	49775	5,84
	Desember	56901	14,31
2008	Maret	57055	0,27
	Juni	61477	7,75
	September	63789	3,76
	Desember	67202	5,35
2009	Maret	69758	3,80
	Juni	77243	10,72
	September	74126	-4,03
	Desember	77412	4,43
2010	Maret	69591	-10,10
	Juni	81890	17,67
	September	87522	6,87
	Desember	90999	3,97
2011	Maret	91650	0,72
	Juni	97050	5,89
	September	101492	4,58
	Desember	114725	13,04
2012	Maret	115084	0,31
	Juni	131810	14,53
	September	131785	-0,02
	Desember	142451	8,09

Sumber Data : Bank Indonesia berbagai Edisi setelah diolah, 2014

Posisi kredit yang dimaksudkan disini adalah nilai yang dicatat oleh Bank Indonesia sebagai besaran dari jumlah permintaan maupun penawaran kredit Rupiah Bank Umum sektor pertanian. Permintaan kredit didefinisikan sebagai jumlah kredit yang diminta oleh sektor pertanian, sedangkan penawaran kredit adalah jumlah kredit yang disalurkan oleh Bank Umum ke sektor pertanian.

Dalam teori moneter dipahami bahwa jumlah uang beredar selalu didefinisikan sebagai jumlah permintaan uang (*money demand*) atau jumlah penawaran uang (*money supply*). Oleh karena itu, jumlah permintaan kredit selalu dinyatakan sama dengan jumlah penawaran kredit. Perbedaan analisis pada permintaan maupun penawaran kredit dapat terjadi disebabkan adanya perbedaan faktor – faktor yang mempengaruhinya. Ini pula yang menyebabkan penelitian Zulkifli (2008) yang menyatakan bahwa data permintaan kredit berbeda dengan data penawaran kredit adalah suatu hal yang keliru. Sekali lagi, data permintaan kredit akan selalu sama dengan data permintaan kredit atau *money demand* sama dengan *money supply*.

4.3.3 Perkembangan Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Loan (NPL) Bank Umum di Indonesia

Tujuan mengamati perkembangan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) Bank Umum adalah untuk dijadikan salah satu indikator kemampuan Bank Umum dalam melonggarkan pengucuran kredit pada sektor riil termasuk sektor pertanian. Semakin tinggi CAR perbankan berarti semakin besar kemampuan Bank Umum dalam menyalurkan kredit. Di sisi lain NPL (*Non Performing Loan*) Bank Umum menunjukkan keengganan perbankan dalam mengucurkan kredit. Semakin tinggi NPL dalam penyaluran kredit pada sektor tertentu maka semakin kecil penyaluran kredit pada sektor tersebut. Di sini NPL atau kredit macet dinyatakan dalam bentuk rasio NPL yaitu, perbandingan antara jumlah kredit macet terhadap total kredit yang disalurkan perbankan.

Perkembangan CAR Bank Umum di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4.5. CAR Bank Umum berdasarkan data kuartal selama periode 2006-2012, mencatat angka 15,63% sampai 22,11%. Rasio tertinggi 22,11% tercapai pada kuartal I (Maret) 2007 dan rasio terendah 15,63% tercatat pada kuartal III (September) 2011. Sesungguhnya CAR Bank Umum ini berfluktuasi dari kuartal ke kuartal selama periode 2006-2012.

CAR Bank Umum yang berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun (periode 2006-2012), sepertinya tidak sesuai dengan tren posisi kredit Bank Umum sektor pertanian yang berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (periode 2006-2012). Contohnya secara keseluruhan, pada awal periode (kuartal I/Maret 2006) posisi kredit Bank Umum sektor pertanian sebesar Rp. 36.939 Miliar meningkat menjadi Rp. 142.451 Miliar pada akhir periode (kuartal IV/Desember 2012), sedangkan CAR Bank Umum sebesar 21,84% pada awal periode (kuartal I/Maret 2006), menurun menjadi 17,43% pada akhir periode (kuartal IV/Desember 2012). Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan antara perkembangan posisi kredit Bank Umum sektor pertanian (periode 2006-2012) dan perkembangan CAR Bank Umum (periode 2006-2012). Berdasarkan pengamatan di atas, temuan (Suzuki, 2002) yang menyatakan bahwa modal perbankan berhubungan positif dengan kemampuan perbankan menyalurkan kredit, tidak berlaku pada hubungan antara CAR Bank Umum dan kemampuan perbankan menyalurkan kredit ke sektor pertanian selama periode 2006-2012.

**Tabel 4.5 Perkembangan Kinerja Utama Perbankan Nasional di
Indonesia Periode 2006-2012**

Tahun	Kuartal	CAR (%)	Rasio NPL terhadap Total Kredit (%)
2006	Maret	21,84	8,19
	Juni	20,47	8,33
	September	21,01	7,95
	Desember	21,27	6,07
2007	Maret	22,11	6,04
	Juni	21,15	5,78
	September	21,27	5,17
	Desember	19,3	4,07
2008	Maret	20,52	3,75
	Juni	17,58	3,54
	September	17,26	3,32
	Desember	16,76	3,20
2009	Maret	18,03	3,93
	Juni	18,17	3,94
	September	17,76	3,8
	Desember	17,42	3,31
2010	Maret	19,27	3,36
	Juni	18,06	2,98
	September	16,52	2,96
	Desember	17,18	2,56
2011	Maret	17,57	2,81
	Juni	17,00	2,74

	September	15,63	2,67
	Desember	16,05	2,17
2012	Maret	18,28	2,29
	Juni	17,49	2,18
	September	17,41	2,07
	Desember	17,43	1,87

Sumber Data : Bank Indonesia berbagai Edisi setelah diolah, 2014

Adapun rasio NPL Bank Umum berdasarkan data kuartal selama periode 2006-2012 di Indonesia (Tabel 4.5), mencatat angka 1,87 % sampai 8,33%. Rasio tertinggi 8,33% tercapai pada kuartal II (Juni) 2006 dan rasio terendah 1,87% tercatat pada kuartal IV (Desember) 2012. Sesungguhnya rasio NPL Bank Umum ini berfluktuasi dari kuartal ke kuartal selama periode 2006-2012. Hal menarik untuk dicatat bahwa rasio NPL Bank Umum terakhir kali mengalami peningkatan pada kuartal II (Juni) 2006 dan selanjutnya terus mengalami penurunan dari kuartal ke kuartal hingga akhir periode (kuartal IV/Desember 2012).

Rasio NPL Bank Umum yang berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun (periode 2006-2012), sepertinya tidak sesuai dengan tren posisi kredit Bank Umum sektor pertanian yang berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (periode 2006-2012). Contohnya secara keseluruhan, pada awal periode (kuartal I/Maret 2006) posisi kredit Bank Umum sektor

pertanian sebesar Rp. 36.939 Miliar meningkat menjadi Rp. 142.451 Miliar pada akhir periode (kuartal IV/Desember 2012), sedangkan Rasio NPL Bank Umum sebesar 8,1% pada awal periode (kuartal I/Maret 2006), menurun menjadi 1,87% pada akhir periode (kuartal IV/Desember 2012). Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan antara perkembangan posisi kredit Bank Umum sektor pertanian (periode 2006-2012) dan perkembangan rasio NPL Bank Umum (periode 2006-2012).

Berdasarkan pengamatan di atas, temuan Pazarbasioglu (1997) yang menyatakan bahwa NPL perbankan berhubungan negatif dengan kemampuan perbankan menyalurkan kredit, berlaku pada hubungan antara rasio NPL Bank Umum dan kemampuan perbankan menyalurkan kredit ke sektor pertanian selama periode 2006-2012.

Selain fungsi perbankan sebagai sumber pendanaan, ada beberapa instrumen makroekonomi yang mempengaruhi posisi kredit yang disalurkan pihak perbankan ataupun yang diminta oleh pelaku usaha sektor pertanian, Beberapa instrumen inilah yang akan dibahas selanjutnya.

4.3.4 Perkembangan Nilai Kurs, Suku Bunga dan Inflasi di Indonesia

Tujuan mengamati perkembangan kurs Rupiah terhadap USD, suku bunga kredit Bank Umum, dan inflasi adalah untuk dijadikan salah satu indikator seberapa besar kredit yang diminta para pelaku usaha pada sektor tertentu. Semakin tinggi nilai kurs dan suku bunga berarti semakin kecil kredit yang diminta para pelaku usaha pada sektor tertentu, sedangkan semakin tinggi tingkat inflasi berarti semakin semakin besar kebutuhan dana atau permintaan kredit pada sektor tertentu.

Perkembangan kurs Rupiah terhadap USD di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4.6. Kurs Rupiah terhadap USD berdasarkan data kuartal selama periode 2006-2012, mencatat angka Rp. 8.597 sampai Rp. 11.575. Angka tertinggi Rp. 11.575 tercapai pada kuartal I (Maret) 2009 dan angka terendah Rp. 8.597 tercatat pada kuartal II (Juni) 2011. Sesungguhnya kurs Rupiah terhadap USD ini berfluktuasi dari kuartal ke kuartal selama periode 2006-2012. Hal menarik untuk dicatat bahwa kurs Rupiah terhadap USD pada kuartal IV (Desember) 2008 mengalami peningkatan terbesar yakni sebesar 16,76% pada periode 2006-2012, sebaliknya pada kuartal II (Juni) 2009 mengalami penurunan yang terbesar mencapai – 11,66 % pada periode 2006-2012.

Kurs Rupiah terhadap USD yang berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (periode 2006-2012), sepertinya sesuai dengan tren posisi kredit Bank Umum sektor pertanian yang berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (periode 2006-2012). Contohnya secara keseluruhan, pada awal periode (kuartal I/Maret 2006) posisi kredit Bank Umum sektor pertanian sebesar Rp. 36.939 Miliar meningkat menjadi Rp. 142.451 Miliar pada akhir periode (kuartal IV/Desember 2012), sedangkan kurs Rupiah terhadap USD sebesar Rp. 9.075 pada awal periode (kuartal I/Maret 2006), meningkat menjadi Rp. 9.670 pada akhir periode (kuartal IV/Desember 2012). Hal ini menunjukkan adanya hubungan searah antara perkembangan posisi kredit Bank Umum sektor pertanian (periode 2006-2012) dan perkembangan kurs Rupiah terhadap USD (periode 2006-2012). Berdasarkan pengamatan di atas, temuan Manurung. (2004) dan Muana (2005) yang menyatakan bahwa nilai kurs berhubungan negatif dengan kebutuhan dana/kredit para pelaku usaha,tidak berlaku pada hubungan antara kurs.

Tabel 4.6 Perkembangan Kurs, Suku Bunga Kredit Bank Umum dan Inflasi di Indonesia Periode 2006-2012

Tahun	Kuartal	Perkembangan Instrumen Makroekonomi			
		Kurs		Suku Bunga Kredit Bank Umum (%)	Inflasi (%)
		Nilai (Rp)	Pert (%)		
2006	Maret	9075	-	16,13	15,74
	Juni	9300	2.479339	16,05	15,53
	September	9235	-0.69892	15,74	14,55
	Desember	9020	-2.3281	15,09	6,6
2007	Maret	9118	1.086475	14,51	6,52
	Juni	9054	-0.70191	13,94	5,77
	September	9137	0.916722	13,38	6,95
	Desember	9419	3.086352	13,01	6,59
2008	Maret	9217	-2.1446	12,74	8,17
	Juni	9225	0.086796	12,75	11,03
	September	9378	1.658537	13,63	12,14
	Desember	10950	16.76264	14,81	11,06
2009	Maret	11575	5.707763	14,52	7,92
	Juni	10225	-11.6631	14,15	3,65
	September	9681	-5.32029	13,69	2,83
	Desember	9400	-2.90259	13,33	2,78
2010	Maret	9115	-3.03191	13,13	3,43
	Juni	9083	-035107	12,94	5,05
	September	8924	-1.75052	12,71	5,80
	Desember	8991	0,750784	12,56	6,96

2011	Maret	8709	-3,13646	12,25	6,65
	Juni	8597	-1,28602	12,18	5,54
	September	8823	2,62882	12,23	4,61
	Desember	9066	2,77683	12,10	3,79
2012	Maret	9180	1,23511	11,82	3,97
	Juni	9480	3,26797	11,63	4,53
	September	9588	1,13924	11,53	4,31
	Desember	9670	0,85523	11,38	4,30

Sumber Data : Bank Indonesia berbagai Edisi setelah diolah, 2014

Untuk perkembangan suku bunga kredit Bank Umum di Indonesia dapat diamati pada Tabel 4.6. Suku bunga kredit Bank Umum berdasarkan data kuartal selama periode 2006-2012, mencatat angka 11,38% sampai 16,13%. Angka tertinggi 16,13% tercapai pada kuartal I (Maret) 2006 dan angka terendah 11,38% tercatat pada kuartal IV (Desember) 2012. Sesungguhnya suku bunga kredit Bank Umum ini berfluktuasi dari kuartal ke kuartal selama periode 2006-2012. Hal menarik untuk dicatat bahwa suku bunga kredit Bank Umum mulai dari kuartal I (Maret) 2006 terus mengalami penurunan hingga kuartal II (Juni) 2008 dan kembali mengalami peningkatan hingga pada kuartal II (Juni) 2009 dan selanjutnya terus menurun hingga kuartal IV (Desember) 2012.

Suku bunga kredit Bank Umum yang berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun (periode 2006-2012),

sepertinya tidak sesuai dengan tren posisi kredit Bank Umum sektor pertanian yang berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (periode 2006-2012). Contohnya secara keseluruhan, pada awal periode (kuartal I/Maret 2006) posisi kredit Bank Umum sektor pertanian sebesar Rp. 36.939 Miliar meningkat menjadi Rp. 142.451 Miliar pada akhir periode (kuartal IV/Desember 2012), sedangkan suku bunga kredit Bank Umum sebesar 16,13% pada awal periode (kuartal I/Maret 2006), menurun menjadi 11,38% pada akhir periode (kuartal IV/Desember 2012). Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan antara perkembangan posisi kredit Bank Umum sektor pertanian (periode 2006-2012) dan perkembangan suku bunga kredit Bank Umum (periode 2006-2012).

Temuan Harris (1981) dan Laidler (1985) menyatakan bahwa dari sisi permintaan kredit, tingkat suku bunga kredit perbankan berhubungan negatif dengan kebutuhan dana/kredit para pelaku usaha. Berdasarkan pengamatan perkembangan suku bunga kredit Bank Umum di atas, teori ini berlaku pada hubungan antara suku bunga kredit Bank Umum dan kebutuhan dana/kredit para pelaku usaha pada sektor pertanian selama periode 2006-2012.

Adapun perkembangan tingkat inflasi di Indonesia dapat diamati pada Tabel 4.6. Inflasi berdasarkan data kuartal selama periode 2006-

2012, mencatat angka 2,78% sampai 15,74%. Angka tertinggi 15,74% tercapai pada kuartal I (Maret) 2006 dan angka terendah 2,78% tercatat pada kuartal IV (Desember) 2009. Sesungguhnya inflasi ini berfluktuasi dari kuartal ke kuartal selama periode 2006-2012. Hal menarik untuk dicatat tingkat inflasi tahun 2006 dari kuartal I (Maret) 2006 sampai kuartal III (September) 2006 mencapai tingkat-tingkat yang tertinggi pada periode 2006-2012.

Inflasi yang berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun (periode 2006-2012), sepertinya tidak sesuai dengan tren posisi kredit Bank Umum sektor pertanian yang berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (periode 2006-2012). Contohnya secara keseluruhan, pada awal periode (kuartal I/Maret 2006) posisi kredit Bank Umum sektor pertanian sebesar Rp. 36.939 Miliar meningkat menjadi Rp. 142.451 Miliar pada akhir periode (kuartal IV/Desember 2012), sedangkan inflasi sebesar 15,74% pada awal periode (kuartal I/Maret 2006), menurun menjadi 4,30% pada akhir periode (kuartal IV/Desember 2012). Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan antara perkembangan posisi kredit Bank Umum sektor pertanian (periode 2006-2012) dan perkembangan inflasi (periode 2006-2012). Berdasarkan pengamatan di atas, temuan Harmanta dan Ekananda (2003) yang menyatakan bahwa inflasi berhubungan positif dengan kebutuhan

dana/kredit para pelaku usaha, tidak berlaku pada hubungan antara inflasi dan kebutuhan dana/kredit para pelaku usaha pada sektor pertanian selama periode 2006-2012.

Setelah mengamati mulai dari gambaran umum perekonomian dan sektor pertanian, serta perkembangan beberapa variabel yang mempengaruhi perbankan untuk menyalurkan kredit maupun pelaku usaha untuk mengambil kredit, maka pada bahasan selanjutnya akan dikaji lebih dalam analisis pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kredit pada sektor pertanian.

4.4 Analisis Faktor Penentu Jumlah Kredit Sektor Pertanian di Indonesia

Untuk menganalisis pengaruh faktor – faktor penentu jumlah kredit sektor pertanian di Indonesia periode 2006 - 2012, maka dilakukan analisis regresi linear berganda. Dalam analisis regresi ini, yang menjadi variabel dependen adalah posisi kredit Rupiah Bank Umum yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha sektor pertanian maupun yang ditawarkan oleh pihak bank ($\ln Y$), sedangkan variabel independen adalah Rasio PDB (Produk Domestik Bruto) (x_1), Kurs (x_2), Inflasi (x_3) Suku Bunga (x_4), Modal (x_5) dan NPL (x_6).

Berdasarkan analisis regresi, dengan menggunakan persamaan (3.2.) maka diperoleh hasil perhitungan seperti pada Tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7 Hasil Estimasi Fungsi Jumlah Kredit Sektor Pertanian

Variabel Independen	Koefisien Regresi	t-Statistic	Probability
Rasio PDB (X_1)	-0,0275	-1,1190	0,2758
Kurs ($\ln X_2$)	1,1465**	1,9791	0,0611
Inflasi (X_3)	-0,0152	-1,4375	0,1653
Suku Bunga (X_4)	-0,2283*	-3,5120	0,0021
Modal (X_5)	-1,0054*	-3,4145	0,0026
NPL (X_6)	0,0758	1,1758	0,2528
Constanta	5,7917	1, 2099	0,2397

= 5% t- tabel = 2,074, = 10% t-tabel = 1,717 ; $R^2 = 0,9072$
adjusted $R^2 = 0,8807$; N = 28 F-statistic = 34,24104 ;
Prob(F-statistic) = 0,0000 ; DW = 0,8283 ; DL = 0,764; DU = 1,729

Ket : Hasil Pengujian dengan menggunakan Eviews

* = Signifikasi 5 %

** = Signifikasi 10 %

Tabel 4.7 dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi berikut :

$$\ln Y = 5,791703 - 0,027557 x_1 + 1,146529 \ln x_2 - 0,015298 x_3 - 0,228396 x_4 - 0,100542 x_5 + 0,075822 x_6 \dots \quad (4.2)$$

$$(-1,119009) \quad (1,979110) \quad (-1,437511) \quad (-3,512045) \quad (-3,414555) \quad (-1,175826)$$

Dari hasil regresi di atas, nilai *R square* (R^2) sebesar 0,9072, berarti 90,72% variasi perubahan variabel jumlah kredit dapat dijelaskan

secara simultan oleh variasi perubahan variabel-variabel rasio PDB (Produk Domestik Bruto), kurs, inflasi, suku bunga kredit, modal dan NPL. Sisanya sebesar 9,28% ditentukan oleh variabel atau faktor lainnya di luar model.

Dengan nilai F sebesar 34,2410 dan Probability sebesar 0.0000, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dengan menggunakan variabel-variabel independen rasio PDB, kurs, inflasi, suku bunga, modal dan NPL, secara simultan dapat menjelaskan jumlah kredit sektor pertanian di Indonesia pada tingkat signifikansi 10%, nilai dw sebesar 0,82, dl sebesar 0,764 dan du sebesar 1,729 ini menjelaskan bahwa tidak ada autokorelasi ini dikarenakan DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan $(4 - du)$, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi

Variabel yang tidak signifikan mempengaruhi jumlah kredit sektor pertanian, dengan $\alpha = 10\%$ adalah variabel : (i) rasio PDB sektor pertanian atas total PDB (x_1) dengan nilai t sebesar -1,11 lebih kecil dari nilai t-tabel 1,71 dan propability sebesar 0,27 ; (iii) inflasi (x_3) dengan nilai t sebesar -1,43 lebih kecil dari nilai t-tabel 1,71 dan propability sebesar 0,16 dan (iv) NPL (x_6) dengan nilai t sebesar 1,17 lebih kecil dari nilai t-tabel 1,71 dan propability sebesar 0,25.

Adapun variabel yang signifikan mempengaruhi jumlah kredit sektor pertanian, dengan $t = 10\%$ adalah variabel (ii) Kurs (x_2) dengan nilai t sebesar 1,97911 nilai koefisien sebesar 1,14652, menyatakan bahwa setiap 1% penurunan Kurs akan menurunkan jumlah kredit pelaku usaha sektor pertanian sebesar 1,14%, sebaliknya 1% peningkatan Kurs akan meningkatkan jumlah kredit pelaku usaha sektor pertanian sebesar 1,14%. Sedangkan variabel yang signifikan mempengaruhi jumlah kredit sektor pertanian, dengan $t = 5\%$ (iv) Suku Bunga (x_4) dengan nilai t sebesar $-3,5120$ nilai koefisien sebesar $-0,2283$, menyatakan bahwa setiap 1% penurunan Suku Bunga akan meningkatkan jumlah kredit pelaku usaha sektor pertanian sebesar 0,2283%, sebaliknya 1% peningkatan Suku Bunga akan menurunkan jumlah kredit pelaku usaha sektor pertanian sebesar 0,2283%. dan Variabel (v) modal (x_5) dengan nilai t sebesar $-3,4145$ nilai koefisien sebesar $-0,1005$, menyatakan bahwa setiap 1% penurunan modal (CAR) akan meningkatkan jumlah kredit pelaku usaha sektor pertanian sebesar 0,1005%, sebaliknya 1% peningkatan modal (CAR) akan menurunkan jumlah kredit pelaku usaha sektor pertanian sebesar 0,1005%.

Pengaruh Positif dan signifikan variabel Kurs terhadap jumlah kredit pada sektor pertanian, berarti semakin rendah Kurs, mengakibatkan jumlah

kredit oleh Bank Umum ke pelaku usaha sektor pertanian juga menurun, sebaliknya semakin tinggi Kurs, mengakibatkan jumlah kredit oleh Bank Umum ke pelaku usaha sektor pertanian meningkat. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa Kurs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah kredit sektor pertanian. Selain itu, hasil ini juga tidak sesuai dengan temuan Manurung M. (2004) dan Muana (2005). Yang menyatakan bahwa kenaikan nilai kurs ditandai dengan terjadinya depresiasi (melemahnya Rupiah terhadap USD), menyebabkan meningkatnya pendapatan ekspor yang berujung pada minimnya kebutuhan dana/kredit. Hal ini menunjukkan bahwa kurs berpengaruh negatif terhadap permintaan kredit. Di sisi lain otoritas Bank akan menurunkan jumlah uang yang beredar ketika kurs naik, dan dengan asumsi permintaan kredit lebih besar dari penawaran kredit dan penurunan jumlah uang yang beredar lebih kecil dari penurunan kebutuhan dana/kredit maka gap kredit akan menurun.

Berdasarkan temuan di atas, semakin tinggi kurs yang berarti semakin tinggi pula kebutuhan akan dana atau kredit, mengakibatkan jumlah kredit oleh Bank Umum ke pelaku usaha sektor pertanian meningkat. Hal ini disebabkan pendapatan ekspor sektor pertanian masih kurang.

Dari uraian di atas, untuk mendukung peningkatan pendapatan akan dana, para pelaku sektor pertanian dianjurkan untuk meningkatkan produksi pertanian dengan produk yang berkualitas ekspor.

Pengaruh negatif dan signifikan variabel suku bunga kredit terhadap jumlah kredit pada sektor pertanian, berarti semakin rendah suku bunga kredit yang ditetapkan oleh Bank Umum, mengakibatkan jumlah kredit oleh Bank Umum ke pelaku usaha sektor pertanian meningkat, sebaliknya semakin tinggi suku bunga kredit, mengakibatkan jumlah kredit oleh Bank Umum ke pelaku usaha sektor pertanian menurun. Hasil sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah kredit sektor pertanian. Selain itu, hasil ini juga sesuai dengan temuan Harris (1981) dan Laidler (1985) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat bunga akan menyebabkan orang cenderung menabung dan mengurangi pengeluarannya, akibatnya permintaan untuk mengambil kredit akan turun. Implikasinya adalah untuk mendukung peningkatan jumlah kredit oleh para pelaku usaha pada sektor pertanian, Bank Umum harus menurunkan suku bunga kreditnya.

Berdasarkan temuan di atas, semakin tinggi suku bunga kredit yang berarti semakin tinggi pula biaya dana, mengakibatkan jumlah kredit oleh Bank Umum ke pelaku usaha sektor pertanian menurun. Hal ini disebabkan sektor pertanian adalah sektor yang sifatnya musiman dan sangat berpotensi menghasilkan kredit macet apabila diberikan kredit dengan suku bunga tinggi.

Dari uraian di atas, untuk mendukung peningkatan jumlah kredit Bank Umum ke para pelaku usaha sektor pertanian, para pelaku sektor pertanian dianjurkan untuk mengambil kredit dengan suku bunga rendah.

Pengaruh negatif dan signifikan pada variabel modal terhadap jumlah kredit sektor pertanian, berarti semakin rendah modal yang mencerminkan penurunan rasio kecukupan modal bank umum mengakibatkan meningkatnya jumlah kredit sektor pertanian, sebaliknya semakin tinggi modal yang mencerminkan peningkatan rasio kecukupan modal bank umum mengakibatkan menurunnya jumlah kredit sektor pertanian penyebabnya adalah semakin sehat modal perbankan secara spesifik maka akan mempengaruhi penurunan jumlah kredit sektor pertanian.

Hal ini menjelaskan bahwa walaupun perbankan memiliki modal yang banyak, perbankan masih tetap berhati-hati dalam pemberian kredit di sektor pertanian karena dianggap terlalu beresiko tinggi. Selain itu, hasil ini juga tidak sesuai dengan temuan Suzuki (2002) yang menyatakan bahwa dengan modal yang semakin besar, berarti kemampuan bank menyalurkan kredit juga akan semakin besar. implikasinya adalah Bank Umum tidak memperhatikan penyaluran kredit di sektor pertanian padahal sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang besar dalam penyerapan tenaga kerjanya.

Sementara itu, rasio PDB sektor pertanian atas total PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah kredit pada sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan ataupun penurunan rasio PDB sektor pertanian terhadap total PDB tidak mempengaruhi besar kecilnya kebutuhan dana/kredit para pelaku usaha pada sektor pertanian. Penyebabnya adalah usaha pada sektor pertanian sifatnya musiman dan tergantung pada faktor alam, sehingga mengambil kredit dengan menjadikan rasio PDB sektor pertanian terhadap total PDB sebagai indikator, merupakan hal yang tidak dilakukan oleh para pelaku usaha sektor pertanian. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa rasio PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan kredit pada sektor pertanian. Selain itu, hasil ini juga tidak sesuai dengan temuan Manurung. (2004) dan Muana (2005) yang menyatakan bahwa PDB merupakan salah satu faktor yang positif dan signifikan mempengaruhi permintaan kredit. Dari temuan di atas, implikasinya adalah Bank Umum selaku pihak perbankan tidak perlu melihat seberapa besar rasio PDB sektor pertanian terhadap total PDB dalam menyalurkan kredit ke sektor pertanian.

Adapun inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah kredit pada sektor pertanian. Hal ini berarti peningkatan ataupun penurunan inflasi tidak mempengaruhi besar kecilnya kebutuhan dana/kredit para pelaku usaha pada sektor pertanian. Penyebabnya adalah usaha pada sektor pertanian

sifatnya musiman dan tergantung pada faktor alam, sehingga mengambil kredit dengan menjadikan inflasi sebagai indikator, merupakan hal yang tidak dilakukan oleh para pelaku usaha sektor pertanian. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kredit sektor pertanian. Selain itu hasil ini juga tidak sesuai dengan temuan Harmanta dan Ekananda (2003) yang menyatakan bahwa inflasi memiliki hubungan yang positif dengan permintaan kredit. Dari temuan di atas, implikasinya adalah Bank Umum tidak perlu memperhatikan tinggi rendahnya tingkat inflasi dalam menyalurkan kredit ke sektor pertanian sepanjang tingkat pertumbuhan inflasi kecil.

Dan terakhir NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap Jumlah kredit pada sektor pertanian. Hal ini berarti peningkatan ataupun penurunan NPL tidak mempengaruhi besar kecilnya kebutuhan dana/kredit para pelaku usaha pada sektor pertanian. Penyebabnya adalah usaha pada sektor pertanian sifatnya musiman dan tergantung pada faktor alam, sehingga mengambil kredit dengan menjadikan NPL sebagai indikator, merupakan hal yang tidak dilakukan oleh para pelaku usaha sektor pertanian. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah kredit sektor pertanian. Selain itu hasil ini juga tidak dengan temuan Pazarbasioglu (1997) yang menyatakan bahwa menurunnya nilai NPL bank menyebabkan pendapatan (profit) yang diperoleh

bank meningkat sehingga kemampuan bank menawarkan kredit meningkat pula. Dengan asumsi permintaan kredit tetap dan lebih besar dari penawaran kredit, maka gap kredit akan menurun. Dari temuan diatas, implikasi adalah bank umum melakukan penjataan dalam menyalurkan kredit ke sektor pertanian dan juga bank umum kurang memperhatikan dan tidak menjadikan rasio NPL sebagai bahan pertimbangan dalam penyaluran kreditnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari keseluruhan analisis mengenai pengaruh faktor penentu jumlah kredit sektor pertanian di Indonesia, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Rasio PDB, inflasi dan NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah kredit sektor pertanian.
2. Suku bunga dan modal perbankan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah kredit pada sektor pertanian.
3. Kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kredit sektor pertanian

5.2 Saran

1. Bank Umum selaku pihak perbankan selaku yang menyalurkan kredit ke sektor pertanian tidak perlu memperhatikan besar kecilnya rasio PDB sektor pertanian terhadap total PDB dalam pemberian kreditnya. Namun begitu, para pelaku usaha sektor pertanian dianjurkan tetap meningkatkan PDB sektor pertanian atau dengan kata lain

meningkatkan produktivitas petani yang nantinya akan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan PDB secara keseluruhan.

2. Pemerintah dalam hal ini sebagai menentu kebijakan hendaknya memberikan regulasi yang mendukung peningkatan ekspor produk pertanian serta para pelaku sektor pertanian hendaknya meningkatkan produksinya dengan kualitas ekspor.
3. Bank Umum selaku pihak perbankan tidak perlu memperhatikan tinggi rendahnya tingkat inflasi dalam menyalurkan kredit ke sektor pertanian sepanjang pertumbuhan inflasi kecil.
4. Para pelaku usaha sektor pertanian dianjurkan untuk mengambil kredit dengan suku bunga rendah agar potensi adanya kredit macet pada sektor pertanian berkurang.
5. Kebijakan perbankan untuk meningkatkan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) perlu didorong karna bagaimanapun perbankan harus sehat dalam pemberian kreditnya.
6. Bank Umum harus berupaya untuk mencegah adanya kredit macet pada sektor pertanian dengan cara memberikan kredit ke sektor pertanian dengan suku bunga yang rendah. Selain itu, para pelaku usaha di sektor pertanian dianjurkan untuk mengambil kredit dengan suku bunga yang rendah agar potensi adanya kredit macet juga rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (2005 : 2) . Gejolak Minyak dan Rupiah Pangkas BI – 40. Bisnis Indonesia. 29 Agustus 2005
- Agenor, P.R., J. Aizenman, dan A. Hoffmaister, (2000:3:9). *The Credit Crunch in East Asia : What Can Bank Excess Liquid Assets Tell Us?*. NBER, Inc., Cambridge. Working Paper 7951
- Agung, J. dkk, (2001 : 1). *Credit Crunch di Indonesia Satelah Krisis. Fakta, Penyebab dan Implikasi Kebijakan*. Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia.
- Berger, A.N. dan G.F Udell. (1992 : 20), *Some Evidence on The Emplace/ Significance of Credit Rationing*. *Journal of Political Economy*, vol. 100(5).
- Bernanke, B. S., (1983 : 20). *Nonmonetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression*. American Economic Review.
- Freixas, Xavier, Jean-Charles Rochet. (2001:14) "Microeconomics of Banking". The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
- Grabbe, O.J. (1998:18). *The Credit Crunch. Laissez Faire City Times. Vol 2*
- Grant, C. (2001:18), *Estimating Credit Constraints among US Households*. University College London. Research Paper.
- Henderson, J.M. dan R.E. Quant. (1980 : 16). *Microeconomic Theory, A Mathematical Approach*. McGraw-Hill Book Co..
- Harmanta dan Ekananda Mahyus. (2003 : 4), Disintermediasi Fungsi Perbankan di Indonesia Pasca Krisis 1997: Faktor Permintaan atau Penawaran Kredit dengan Model Equilibrium, Bulletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 8, No.1, Juni 1410-8046

- Harris, L. (1981:25), *Monetary Theory*, McGraw-Hill, Inc.
- Hurlin, C. dan R.Kierzenkowski, (2003: 20). *Credit Market Disequilibrium in Poland, Can We Find What We Expect?, Non-Stationary and the Min Condition*, William Davidson Institute at University of Michigan Business School. Working Paper Number 581, June 2003.
- Manurung M, P. Rahardja, (2004:23:24), *Uang, Perbankan dan Ekonomi Moneter* (Kajian Kontekstual Indonesia), Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Manurung M, P. Rahardia, (2004:28), *Teori Ekonomi Makro*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muana Nanga, (2005:23:24). *Makro Ekonomi : Teori, Masalah dan Kebijakan*, Divisi Perguruan Tinggi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Nuryakin, Chaikal., Warjiyo, Perry. (2005:15). "Perilaku Penawaran Kredit Bank di Indonesia: Kasus Pasar Oligopoli Periode Januari 2001-Juli 2005, Buletin Ekonomi, Moneter dan Perbankan, Volume 9, No.2, 2006. Bank Indonesia.
- Pazarbasioglu, C. (1997:28). *A Credit Crunch? Finland in the Aftermath of the Banking Crisis*. IMF Staff Paper, Vol. 44.
- Purwanto Daniel Adi, (2005:5), *Menggerak Dunia Usaha Melalui Pemulihan Intermediasi Perbankan : Masalah, Tantangan dan Solusi*, INDEF
- Riyadi, Slamet, (2003:21), *Banking Assets and Liliability Management*, Jakarta, Lembaga penerbit FE-UI.
- Smith, B. D. (2003:8) . *Taking Intermediation Seriously*. Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 35, No. 6, Part 2: Recent Development in Monetary Economics (December 2003), pp. 1319-1357.
- Stiglitz, J.E., dan B. Greenwald. (2003:2:4:8). *Towards a New Paradigm in Monetary Economics*. Cambridge University Press.
- Stiglitz, J.E. and Weiss, A. (1981:8:19). *Credit Rationing in Markets with Imperfect Information*. The American Economic Review.
- Suzuki T, (2002:27), *Credit Channel and Risk-Based Capital Adequacy Requirements*. Working Papers No. 422 in Economics and Econometrics, The Australian National University.

- Syamsuddin, Jafar, (1993:25), *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta.
- Viieries, Yiannis P and Frederick D, Sebold, (1977:24), *Macroeconomics Models and Policy*. Santa Barbara : John Wiley & Son, Inc.
- Zulkifli, (2008:24), *Fenomena Credit Crunch di Indonesia*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Terakreditasi SK.Diren Dikti No.55/DIKTI/Kep/2005, Tanggal 17 November 2005, Volume IX No 1 Februari 2008, ISSN 1411-5352

Dependent Variable: Y

Lampiran

Hasil Regresi Fungsi Jumlah Kredit Sektor Pertanian

Method: Least Squares

Date: 01/15/14 Time: 11:51

Sample: 2006Q1 2012Q4

Included observations: 28

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.791703	4.786660	1.209967	0.2397
X1	-0.027557	0.024626	-1.119009	0.2758
X2	1.146529	0.579315	1.979110	0.0611
X3	-0.015298	0.010642	-1.437511	0.1653
X4	-0.228396	0.065032	-3.512045	0.0021
X5	-0.100542	0.029445	-3.414555	0.0026
X6	0.075822	0.064484	1.175826	0.2528
R-squared	0.907263	Mean dependent var		11.18161
Adjusted R-squared	0.880766	S.D. dependent var		0.391298
S.E. of regression	0.135116	Akaike info criterion		-0.953048
Sum squared resid	0.383383	Schwarz criterion		-0.619997
Log likelihood	20.34267	F-statistic		34.24104
Durbin-Watson stat	0.828366	Prob(F-statistic)		0.000000